



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Bridging the Research to the Role and Function of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

Exposure Materials

SEMINAR & FOCUS GROUP DISCUSSION

Akuntabilitas Pengeluaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Bridging the Research to the Role and Function of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

Exposure Materials

SEMINAR & FOCUS GROUP DISCUSSION

Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



Kepala Badan Keahlian DPR RI
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.



Ucapan terima kasih dan salam hormat secara khusus Kami sampaikan kepada Bapak H.Yandri Susanto, S.Pt sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI yang berkenan menjadi Keynote Speaker pada seminar yang telah diselenggarakan pada 20-28 April 2021. Tentunya kehadiran Ketua Komisi VIII merupakan bentuk dukungan sekaligus dapat mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus secara

sungguh-sungguh dan berkomitmen tinggi melakukan perbaikan pengelolaan DIKS sebagai basis data penyelenggaraan program perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Begitu juga terima kasih dan apresiasi Kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika, yaitu Rektor dan para Dekan Universitas Muhammadiyah Cirebon, Rektor Universitas Swadaya Gunungjati, dan Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah berpartisipasi memberikan pandangannya pada acara seminar dan FGD tersebut. Kehadiran dan melibatkan perguruan tinggi menjadi penting sebagai faktor pendukung bagi efektivitas usaha perbaikan pengelolaan DIKS).



Drs. Helmizar, M.E.

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara



Konklusi yang dihasilkan pada Seminar dan FGD yang telah diselenggarakan pada 26-28 April 2021 oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara-Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI terkait Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyampaian pendapat dan penyusunan kebijakan DPR RI sebagai pelaksanaan fungsi dibidang pengawasan atas kebijakan Pemerintah. Tentu hal ini sebagai bentuk dukungan utama Badan Keahlian kepada Pimpinan dan Anggota DPR dalam rangka

memastikan pemanfaatan DTKS bagi penguatan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Bahan masukan ini menjadi titik kritis (*critical point*) dalam implementasi kebijakan DTKS yang disarikan dari berbagai pandangan objektif sivitas akademika yang *notabene* memiliki kedekatan aktivitas sosial dengan penduduk miskin dan rentan sebagai target sasaran program kesejahteraan sosial yang lebih dominan berada di wilayah perdesaan. Sejatinya enam point penting berikut ini mendapatkan perhatian para pembuat dan pelaksana kebijakan layanan dan pendataan bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan DTKS yang lebih efektif dan akuntabel di masa mendatang.

- ❖ Perlu untuk memastikan dasar hukum yang mengatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan pendataan dan verbal DTKS secara berkelanjutan.
- ❖ Perlu adanya regulasi yang mengatur ketersediaan petugas pendata dengan mempertimbangkan jumlah RuTa yang menjadi tanggung jawabnya; kualifikasi petugas pendata; dan standar honorarium petugas pendata.
- ❖ Perlu adanya dasar hukum pemberian *reward and punishment* kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DTKS.
- ❖ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu untuk segera merumuskan secara resmi mekanisme pelibatan Perguruan Tinggi dalam pengelolaan DTKS.
- ❖ Perlunya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pengelolaan DTKS oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- ❖ Pemerintah Daerah perlu menyusun struktur organisasi, SOP/Juklak/Juknis, dan aturan intern terkait Monitoring dan Evaluasi atas pengelolaan DTKS. Untuk itu, Kementerian Sosial perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan seluruh daerah telah memiliki regulasi tersebut.





KEYNOTE SPEECH



Ketua Komisi VIII DPR RI

H. Yandri Susanto, S.Pt.

Patut disadari bersama bahwa ketepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi satu hal yang sangat penting untuk dipenuhi karena menjadi rujukan pada penyelenggaraan layanan dan pendataan dalam implementasi kebijakan Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Namun kenyataannya, dengan masih banyak ditemukan data invalid yang ada di DTKS dalam pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Kemensos maupun Kementerian/Lembaga lain menjadi bukti bahwa DTKS belum memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan reliabel.



Komisi VIII DPR RI menyadari bahwa pemutakhiran dan memastikan data yang akurat melalui verifikasi dan validasi secara berkala menjadi keniscayaan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan itu, maka Komisi VIII melalui Panitia Kerja (Panja) tentang verval DTKS yang dibentuk pada Masa Persidangan III dan IV Tahun 2019-2020, melakukan pembahasan secara intensif mengenai persoalan verval tersebut bersama pejabat Kementerian/Lembaga, dan juga pemerhati sosial.

Dengan dukungan yang diberikan oleh Komisi VIII melalui keputusan bersama (SKB) dan alokasi anggaran di Tahun 2021, serta tindak lanjut dari berbagai ide dan gagasan yang direkomendasikan pada pelaksanaan seminar dan FGD oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI ini, maka diharapkan berbagai permasalahan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat terselesaikan sehingga penyelenggaraan layanan dan pendataan untuk kegiatan penyaluran bantuan sosial menjadi tepat sasaran, tidak tumpang tindih dan akuntabel.

Dari berbagai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi penting yang dikeluarkan oleh Panja Komisi VIII DPR RI terkait permasalahan DTKS, dimana di antaranya adalah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (Mensos, Mendagri, Menkumham, Menkeu dan Bappenas) terkait verval/pemutakhiran DTKS yang wajib ditaati oleh pemerintah daerah. Begitu juga Komisi VIII telah menyetujui anggaran Kemensos Tahun 2021 untuk pemutakhiran DTKS melalui verval sebesar Rp1,3 triliun.



DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	iii
Keynote Speech Ketua Komisi VIII DPR RI	vi
Daftar Isi	x
 SEMINAR PRESENTATIDN	
Arif Nurdin, M.T. (Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon) Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengelolaan DTKS	2
Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, MA (Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon) Menciptakan peran perguruan tinggi dan sivitas akademika dalam mewujudkan pengelolaan DTKS yang akurat dan mutakhir	13
Dr. H. Mukarto Siswoyo, Drs. M.Si. (Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon) Menciptakan Peran Perguruan Tinggi dan Sivitas Akademika Dalam Mewujudkan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Yang Akurat dan Mutakhir	19
 FOCUS GROUP DISCUSSION PRESENTATION	
Muhammad Nana Trisolvena, MT. (Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Cirebon) Tinjauan Pengaruh Kebijakan Pemerintah Berbasis DTKS Terhadap Indikator Ekonomi Makro	28
Nuri Kartini, MT., IPM., AER (Dekan FT Universitas Muhammadiyah Cirebon) Analisa Pengaruh Jumlah Penerima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Indikator Ekonomi Makro Kota Cirebon	36
Drs. Asep Gunawan, M.Si. (Dekan FE Universitas Muhammadiyah Cirebon) Tinjauan Terhadap Pegaruh Pemanfaatan DTKS Dalam Menunjang Penentuan Indikator Ekonomi Makro di Indonesia	44

Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE, MM., Ak.CA. (Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon)

Pelibatan Perguruan Tinggi Sebagai *Quality Assurance* Dalam Mewujudkan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Yang Akurat dan Mutakhir 63

Aip Syarifudin, M.PdI (Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Cirebon)

Literasi Digital Dalam Mendukung Kelancaran Pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial 82

Rohmat Hidayat, S.IP, MA. (Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon)

Literasi Digital dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 95

Dr. Badawi, SE., MSI. (Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Cirebon)

Peran DTKS Dan Peranggulangan Kemiskinan : Konsep, Implementasi, dan Evaluasi Program..... 111

Puspa Dewi Yuliaty, S.Pd., M.M. (Dosen Universitas Muhammadiyah Cirebon)

Peran DIKS Dalam Menekan Pemborosan Keuangan Negara dan Menurunkan Tingkat Kemiskinan Wilayah 119

Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H. (Dosen FH Universitas Muhammadiyah Cirebon)

Tinjauan Hukum Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan DIKS 129

Drs. Subhan, M.Si. (Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Cirebon)

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 138



SEMINAR PRESENTATION





Arif Nurudin, M.T.
Rektor Universitas Muhammadiyah
Cirebon

TTL: Sukoharjo, 12 Februari 1977

**Alamat Rumah : Blok Jati RT01/01 Kallsapu, Gunung Jati
Kab.Cirebon**

Telepon:085321321008

Riwayat Pendidikan:

**S1 Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun
2002**

S2 Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011

Riwayat Pekerjaan:

Operator CBC PT. Naufando Surabaya Tahun 2002 s/d 2003

Teknisi Listrik PT. Edison Cirebon Tahun 2004 s/d 2006

PJ Teknik CV. Jalayatra Cirebon Tahun 2006 s/d 2012

PJ Teknik PT. Pendawa Lima Samarinda Tahun 2013 s/d Sekarang

**Ahli K3 Umum PT. Glamour Berkas Banjarmasin tahun 2013 s/d
Sekarang**

**Pengajar Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2003 s/d
Sekarang**

Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2021



PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENGELOLAAN DT'KS

**ARIF NURUDIN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**

PENDAHULUAN

Sabtu 16 Mei 2020, 14:45 WIB

KPK Sebutkan Alasan DTKS Miliki Sejumlah Masalah

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum



BERKAS ENLARGE

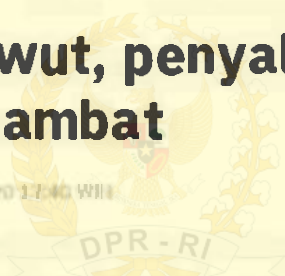
Tidak update data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena kurangnya koordinasi. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan DTKS itu sendiri.

DEPUTI Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fatma Kharisnita, menilai tidak update data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena kurangnya koordinasi. Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan DTKS itu sendiri.

<https://mediaindonesia.com>

Data semrawut, penyaluran bansos terhambat

Auliya Putri Pandasawati | 12/08/2020 17:46 WIB



Semrawutnya data kependudukan di Indonesia membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) terhambat. Terlebih, data penerima bansos sudah tidak diperbaharui sejak lama, yang mengakibatkan distribusi bantuan menjadi terkendala.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui, jika data menjadi sumber masalah dari kacaunya proses penyaluran bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi korona. "Setelah ditelisik, data penerima bantuan sosial ini belum di *update* sejak 2015," ujarnya dalam webinar gotong royong #JagaUMKM, Selasa (11/8/2020).

Sri Mulyani menambahkan, proses pembaharuan data memang tergantung pada pemerintah daerah (Pemda) masing-masing. Namun yang jadi persoalan, Pemda tidak rutin melakukan pembaharuan data tersebut. Sampai kemudian terjadi korona di 2020 yang membutuhkan data terbaru untuk penyaluran bantuan.

Data yang tidak diperbaharui ini menimbulkan ketidaksesuaian antara data Kementerian Sosial dengan realita yang ada di masyarakat. Akibatnya, banyak penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Namun, pemerintah pusat tidak bisa menunggu hingga data diperbaharui karena penyaluran bantuan merupakan hal mendesak. Oleh karena itu, pemerintah tetap menyalurkan anggaran sembari pembaharuan data berjalan.

<https://lokadata.id/artikel/data-semrawut-penyaluran-bansos-terhambat>

Data Penerima Bansos Bermasalah di Cirebon

👤 Oleh: Rahayu 📍 Cirebon Nugroho 📅 24 Feb 2021 05:36

KIRRI, Cirebon: Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, bakal siap memperbaiki pemecalahan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal tersebut dilakukan agar seluruh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk Rakyat dapat bisa diterima sesuai sasaran.

Bupati Cirebon, Timan, menyebutkan, kesalahan DTKS dengan kondisi nyata di lapangan harus segera diselesaikan agar tidak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak tidak bertanggung jawab.

Meskipun tidak memiliki anggaran validasi data, pemerintah pun siap menggandeng perguruan tinggi untuk memperbaiki data masyarakat penerima bantuan.

"Terutama soal BPNT, perlu ditangani dengan cepat, sehingga pemecalahan tidak meluas," kata Timan saat ditemui RRI, di Kantor Bupati Cirebon, Kamis (24/2/2021).



Anggota DPRD Cirebon, Selly Andriany Qantira.

Pada bagian lain, anggota DPR RI Kantiy VII, Selly Andriany Qantira, mengutarakan, dirinya sebagai melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon, terkait sosialisasi validasi data jumlah warga miskin.

Tahun lalu saat awal pandemi, ujar Selly, pemerintah membagikan sejumlah bantuan kepada masyarakat, baik

Berbagai uang tunai atau kebutuhan pokok masyarakat (Bapokmas).

"Terdapat tumpang tindih data penerima bansos. Di masa pemecalahan ekonomi ini, perlu adanya perbaikan dan sinkronisasi data," jelasnya.

Selly mengatakan, setiap daerah harus melakukan update DTKS setiap bulan.

Sebelumnya, pembaruan data tersebut dilakukan hanya dua kali dalam satu tahun.

Dalam upaya tersebut, di Jawa Barat telah ditampung oleh pihak perguruan tinggi, yakni Universitas Padjadjaran.

"Data itu selalu berubah, entah itu meninggal dunia atau yang lainnya," pungkasnya. (Miechell Gatory Kengouw)

TAGS: Cirebon, #Pemerintah Cirebon, RRI Cirebon, @RahayuRahayu, @Cirebon, @Cirebon



<https://ri.co.id/daerah/981676/data-penerima-bansos-bermasalah-di-cirebon>

[HOME](#) / [JAWA BARAT](#)

Banyak Bantuan Tidak Tepat Sasaran, DSP3A Kota Cirebon Akan Lakukan Labelisasi Bagi KPM PKH

ari Septiadi 13 April 2022 07:30 WIB

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kota Cirebon Jawa Barat, pada tahun ini terus gencar-gencarnya melakukan verifikasi dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk usulan beberapa Rumah Tepat Sasaran (RTS) yang masih non DTKS dan akan diusulkan ke DTKS.

Setelah itu, mulai tahun depan hasil pekerjaan DSP3A Kota Cirebon pada tahun ini akan dilakukan labelisasi bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, JKN dan KIS.

Hal tersebut diungkapkan Kepala DSP3A Kota Cirebon ling Daiman usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Cirebon.

Baca Juga: [Kandaskan Mimpi Atalanta di Liga Champions, Thomas Tuchel Sebut PSG Layak Menang](#)

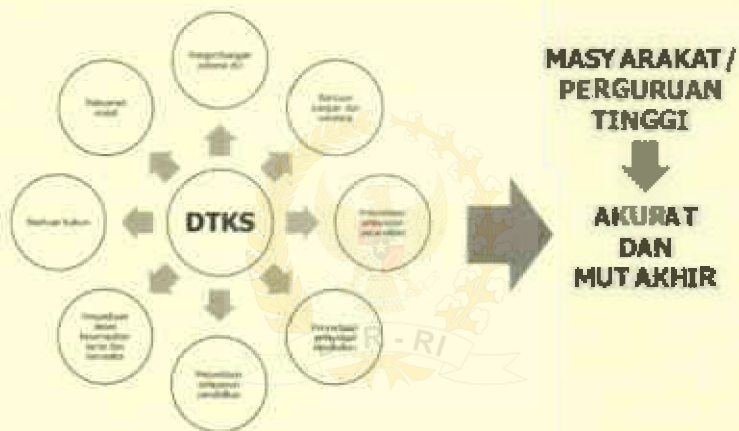
Dikatakan ling dibuatkannya labelisasi untuk KPM pada tahun depan ini, yakni mengantisipasi adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga bagi dia, labelisasi ini sangat penting agar dapat saling mengontrol.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	9,53	8,95	8,71	7,45	6,91	7,88
Kuningan	13,97	13,59	13,27	12,22	11,41	12,82
Cirebon	14,77	13,49	12,97	10,7	9,94	11,24
Majalengka	14,19	12,85	12,6	10,79	10,06	11,43
Indramayu	14,98	13,95	13,67	11,89	11,11	12,7
Kota Cirebon	10,36	9,73	9,66	8,88	8,41	9,52

**Proses Pendataan Data Terpadu
Program Penanganan Fakir Miskin
Ditakukan oleh BPS**



7



UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin



PENDATAAN - VERIFIKASI DAN VALIDASI



REKOMENDASI

1. Optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pengelolaan DTKS melalui implementasi MBKM dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Perbaikan data kependudukan, terutama verifikasi dan validasi NIK
3. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam verifikasi dan validasi DTKS

TEPAT **D**ATA
TEPAT **T**ATA KELOLA
TEPAT **K**ELOMPOK SASARAN
RAKYAT **S**EJAHTERA

KONSULTASI PUBLIK

HASIL
VERVAL

STAKE
HOLDER

PENGUNAAN



TERIMA KASIH BANYAK



Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, MA

**Direktur Pascasarjana
IAIN Syekh Nurjati Cirebon**

TTL : Kuningan, 20 Maret 1959
Pangkat : Pembina Utama Madya(IV/d)
Alamat Kantor : Jl. Pejuang Bypass Suyargi Cirebon
Telepon : 021-7401925
Pendidikan : S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2005)
S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1995)
S1 IAIN Sunan Gunung Djati Bdg (1983)
Pondok Modern Darussalam Gontor (6 thn)

Pengalaman Jabatan :

- 1998-2002 Pembantu Ketua III Bid. Kemahasiswaan STAIN Cirebon
- 2002-2006 Pembantu IV Bid. Kemahasiswaan Dalam dan Luar Negeri STAIN Cirebon
- 2006-2008 Direktur Pascasarjana STAIN Cirebon
- 2008-2011 Rektor IAIN Ambon
- 2011-2013 Direktur Pendidikan Madrasah Dirjen Pendis
- 2013-2014 Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- 2015-skrng Guru Besar pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- 2015-skrng Wakil Ketua LPTNU PBNU (2015-2019)
- 2019-skrng Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

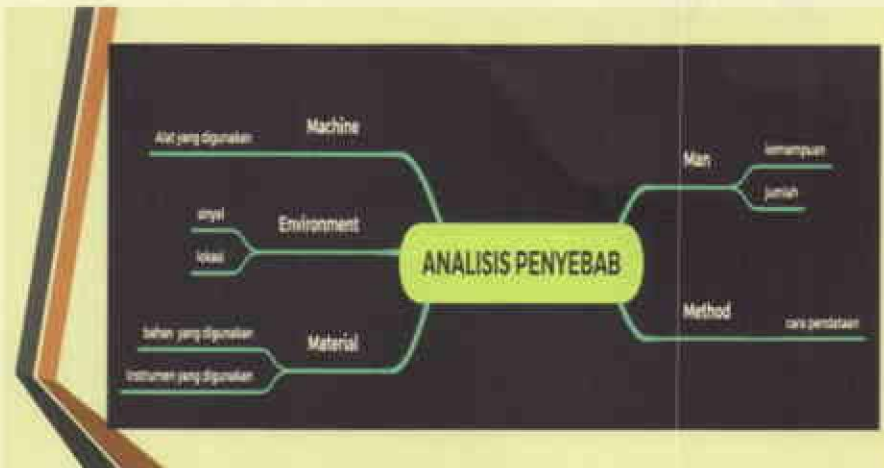


**Menciptakan peran perguruan tinggi dan
sivitas akademika dalam mewujudkan
pengelolaan DTKs yang akurat dan mutakhir**

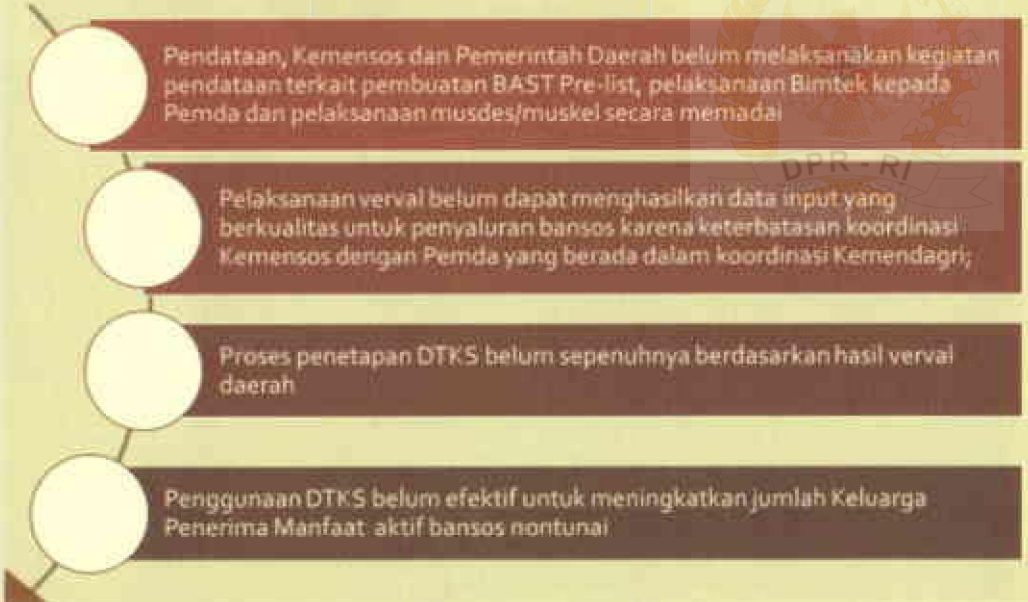
**Prof. Dedi Djubedi, MA.
Swiss Bell, 26 April 2022**



SUMBER ASINKRON DA



Permasalahan



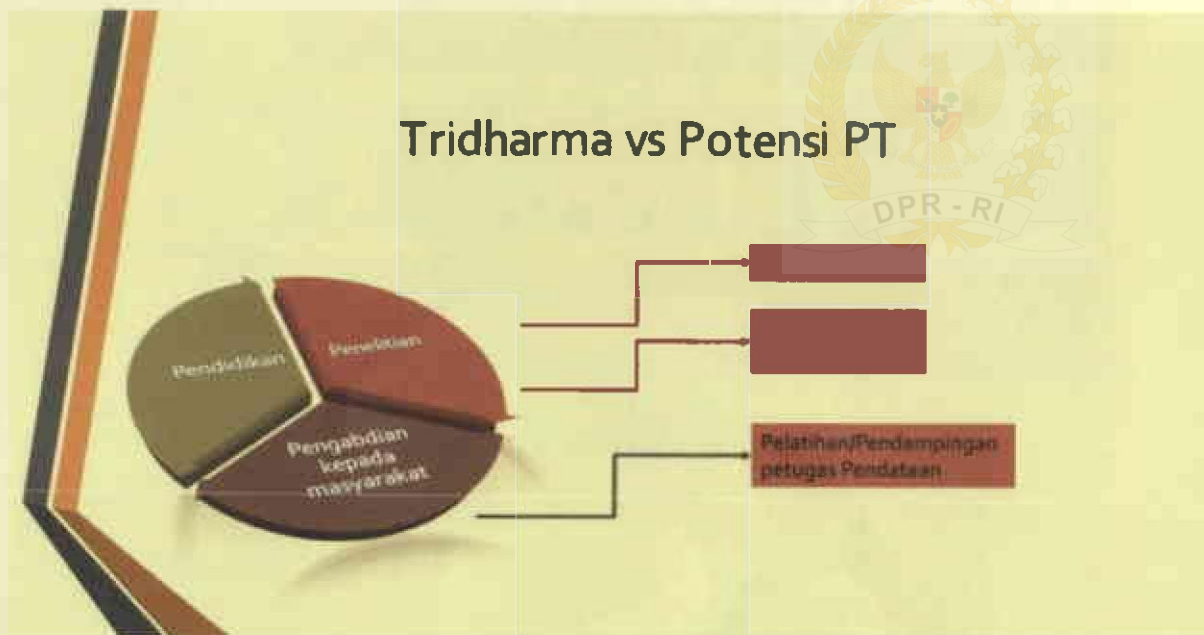
Pendataan, Kemensos dan Pemerintah Daerah belum melaksanakan kegiatan pendataan terkait pembuatan BAST Pre-list, pelaksanaan Bimtek kepada Pemda dan pelaksanaan musdes/muskel secara memadai

Pelaksanaan verval belum dapat menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran bansos karena keterbatasan koordinasi Kemensos dengan Pemda yang berada dalam koordinasi Kemendagri;

Proses penetapan DTKS belum sepenuhnya berdasarkan hasil verval daerah

Penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat aktif bansos nontunai

Tridharma vs Potensi PT





Kebijakan dan Program yang dilakukan

01

Kolaboratif: Melibatkan
berbagai pihak terkait

02

Partisipatif: Semua
urusu terlibat

03

Akuntabel: Semua
akurasi data



01



KKN tematik: Pelibatan
Mahasiswa dalam
pendataan

02



Pendampingan petugas
di daerah

03



Fasilitasi, kolaborasi dan
advokasi oleh dosen

LANGKAH REAL PERGURUAN TINGGI

CURRICULUM VITAE



Dr.H. Mukarto Siswoyo, Drs. M.Si.

**Rektor Universitas Swadaya Gunungjati
Cirebon**

Tempat/tgl lahir
Jabatan Akademik
Alamat Rumah
Alamat Kantor

: Cirebon, 06 Juli 1965
: Lektor Kepala
: Jl. Ki Ageng Tapa No. 64 Gesik, Tengah Tani, Cirebon
: Kampus Universitas Swadaya Gunung Jati Jl. Pemuda No. 32 Cirebon

Riwayat Pendidikan

- S1 STKS, Lulus Tahun 1989, di Bandung
- S2 Universitas Indonesia, Lulus Tahun 1998, di Jakarta
- S3 Universitas Pasundanhus tahun 2015, di Bandung

Riwayat Pekerjaan

- Tahun 1989 - 2003: Dosen PNS di STKS Bandung
- Tahun 2003 - sekarang: Dosen PNS Kopertis Wilayah IV Jabar-Banten Dpk Unswagati Cirebon

Riwayat Jabatan Akademik

- Tahun 1998 - 2000: Lektor Muda
- Tahun 2000 - 2001: Lektor Madya
- Tahun 2001 - 2008: Lektor (Imphasing)
- Tahun 2008 - sekarang: Lektor Kepala

Riwayat Jabatan Struktural

- Tahun 2005 - 2007: Seljur Ilmu Komunikasi FISIP Unswagati
- Tahun 2007 - 2009 : Kepala Bagian Kerjasama Unswagati
- Tahun 2009 - 2010 : Sekret Lembaga Penjaminan Mutu
- Tahun 2010 - 2011 : Kepala Biro Kerja Sama
- Tahun 2011 - 2012 : Wakil Dekan I FISIP Unswagati
- Tahun 2014 - 2015 : Kepala Badan Penjaminan Mutu
- Tahun 2015 - 2017 : Dekan FISIP Unswagati
- Tahun 2018 - sekarang: Rektor UGI

MENCIPTAKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DAN SIVITAS AKADEMIKA DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) YANG AKURAT DAN MUTAKHIR

Oleh :
Prof. Dr. Drs. H. Mukarto Siswono, M.Si.
Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati

Disampaikan dalam Seminar Akuntabilitas Pengelolaan DTKS
yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
Badan Keahlian DPR RI
Cirebon, 26 April 2021

DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

- **DTKS** merupakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program serta mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bansos, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
- **Kegunaan DTKS:**
 1. Melakukan analisis atau perencanaan kegiatan/program penanggulangan kemiskinan.
 2. Menetapkan sasaran penerima manfaat program-program perlindungan sosial.
- **Pengelompokan rumah tangga dalam DTKS** dikelompokkan ke dalam Desil (persepuluhan) di mana seluruh rumah tangga dibagi ke dalam 10 Desil berdasarkan tingkat kesejahteraannya.
 1. Desil 1 yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 % terendah.
 2. Desil 2 yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 - 20 % terendah.
 3. Desil 3 yaitu rumah tangga dalam kelompok 20 - 30 % terendah dan seterusnya.
 4. Desil 10 yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 % dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Istilah sangat miskin, miskin, dan hampir miskin diperoleh dari nilai garis kemiskinan yang berasal dari SUSENAS.

Pengelompokan rumah tangga dengan istilah sangat miskin, miskin, dan hampir miskin memiliki kemungkinan untuk bergeser dari tahun ke tahun menyesuaikan hasil SUSENAS pada tahun tersebut.

DTKS bukan basis data kemiskinan. Penggunaan istilah Desil dalam DTKS lebih sesuai untuk rentang pemanfaatan 3 tahunan.

Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9 % berarti seluruh rumah tangga pada Desil 1 atau 10 % adalah masuk kelompok rumah tangga sangat miskin. Sementara sebagian Desil 2 atau 20 % masuk ke dalam kelompok rumah tangga miskin dan sebagian lainnya masuk ke dalam kelompok rumah tangga hampir miskin.

PERMASALAHAN DTKS :

- 1. PENDATAAN** : Kemensos dan Pemda belum melaksanakan kegiatan pendataan terkait pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pre-list, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pemda, dan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel) secara memadai.
- 2. VERIFIKASI DAN VALIDASI (VERVAL)** : Pelaksanaan verval belum dapat menghasilkan data input yang berkualitas untuk penyaluran Bansos karena keterbatasan koordinasi Kemensos dengan Pemda yang berada dalam koordinasi Kemendagri.
- 3. PENETAPAN DTKS** : Proses penetapan DTKS belum sepenuhnya berdasarkan hasil verval daerah.
- 4. PENGGUNAAN DTKS** : Penggunaan DTKS belum efektif untuk meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat aktif bansos ekonomi.
- 5. PEMUTAKHIRAN DTKS** : Pemutakhiran DTKS secara nasional baru dilakukan pada 39,1 % dan 24,17 juta Rumah Tangga berdasarkan rekapitulasi dan SIKS-Dataku yang memuat informasi alas atas verval DTKS di 408 Kabupaten/Kota mendapat 108 Kabupaten/Kota yang tidak terdapat dalam SIKS-Dataku).

DAMPAK :

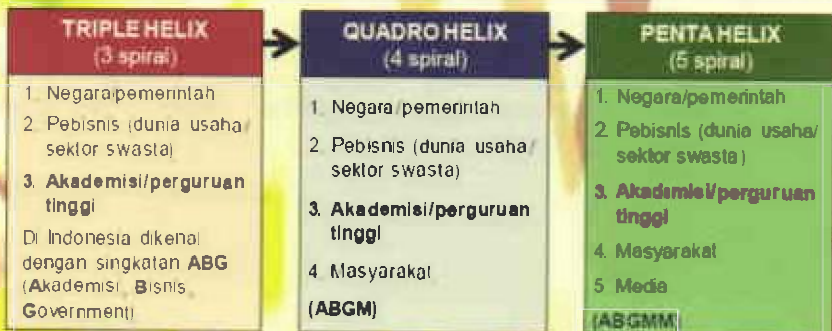
1. DTKS belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai sumber data utama dalam pengambilan keputusan khususnya pada program pertukangan sosial.
2. Penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran.

Salah satu permasalahan yang ditemukan dari kunjungan Tim PKAKN BK DPR RI ke daerah : kurangnya kuantitas dan kualitas SDM (petugas pendata dan pengelola data).

Diperlukan peran perguruan tinggi melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 Ayat 9)

Perguruan tinggi/akademisi beserta seluruh sivitas akademika merupakan salah satu aktor penting yang berkolaborasi dalam public governance

PERKEMBANGAN AKTOR YANG BERKOLABORASI DALAM PUBLIC GOVERNANCE



Kesimpulan : Akademisi/perguruan tinggi merupakan aktor yang berkolaborasi dalam Triple Helix, Quadro Helix dan Penta Helix

PERAN PERGURUAN TINGGI MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN DTKS

Kerjasama/kolaborasi berupa MoU dan MoA antara Perguruan Tinggi dengan Pemda dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTKS, berupa :

- Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) : mahasiswa melakukan pemutakhiran DTKS di desa/kelurahan yang menjadi lokasi KKN.
- Keterlibatan perguruan tinggi sebagai Quality Assurance dalam rangka mewujudkan pengelolaan DTKS yang akurat dan mutakhir.
- Keterlibatan perguruan tinggi dalam seminar, workshop dan pelatihan pengelolaan dan pemutakhiran DTKS.
- Asistensi oleh tenaga ahli/pakar dari perguruan tinggi dalam pengelolaan dan pemutakhiran DTKS.

- Perlu pemetaan wilayah pengabdian masyarakat secara terpadu (KKN Tematik, survei, sensus/pendataan, dan lain-lain) yang dipayungi dengan MoU dan MoA antara seluruh Perguruan Tinggi yang ada di wilayah tersebut dengan Pemda setempat di mana setiap Perguruan Tinggi yang ada di wilayah tertentu (kabupaten/kota) masing-masing memiliki wilayah binaan, wilayah penelitian dan survei yang tetap.



TERIMA KASIH



FOCUS GROUP DISCUSSION PRESENTATION

CURRICULUM VITAE



Muhammad Nana Trisolvena, MT
Wakil Rektor I UMC

TTL : Plaju, 27 November 1976

Riwayat Pendidikan:

S1 Universitas Pasundan Tahun 2000

S2 Universitas Mercu Buana 2014



TINJAUAN PENGARUH
KEBIJAKAN
PEMERINTAH BERBASIS
DTKS TERHADAP
INDIKATOR EKONOMI
MAKRO

M. NANA TRISOLVENA, MT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON



DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL



PROGRAM-PROGRAM YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DENGAN BASIS DTKS



KIP



JKN-KIS



BLT



BPNT



PKH



LEP (LEMBAGA EKONOMI PRODUKTIF)



RUTILAHU



KUBE (KELOMPOK USAHA BERSAMA)

**INDIKATOR
EKONOMI MAKRO**

IPM HDI

01

02

03

**USIA HARAP
HIDUP (UHH)**

**HARAPAN LAMA
SEKOLAH**

**PENGELUARAN
PER KAPITA**

KESEHATAN

PENDIDIKAN

EKONOMI

CNBC 16 Desember 2020

Berdasarkan IPM Tahun 2020

70,94

0,02 (Target 2020 ; 71,98)

(70-80)

Tinggi

UHH :

71,47

0,13(10 thn trend naik)

HLS :

12,98

0,03

RLS :

8,48

0,14

PpK :

11JT

286.000

Secara Nasional :

- 1 Provinsi	(	80	)
- 22 Provinsi	(	70	- 80
- 11 Provinsi	(	60	- 70
(NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, RI, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Malut, Pabar, Papua)			

Secara Global

: 107 dari 187	(	5	di ASEAN)
Versi RI	→		Tinggi
Versi UNDP	→		Tengah

Relevansi Program Pemerintah Terhadap Peningkatan IPM



SIMPULAN

1. Pelayanan kesehatan masih sangat perlu perbaikan baik itu dalam hal sarana prasarana maupun SDM, terutama bagi masyarakat dengan fasilitas JKN-KIS
2. Kualitas pendidikan masih mengalami kesenjangan yang tinggi terutama ditinjau dari aspek kewilayahan dan biaya
3. Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat menjadi fokus yang paling yang paling prioritas untuk terus didorong

TANTANGAN

1. Program pemerintah berbasis DTKS dirasakan cukup berpengaruh terhadap indikator ekonomi makro, hanya masih terus perlu adanya penbebanan dalam proses VerVal sehingga program menjadi lebih tepat sasaran
2. Program pemerintah dalam tataran eksekusi akhir masih kurang mempertimbangkan aspek teknis.
Contoh : masih antri panjang dan lama

SARAN

- 1. Dalam proses VerVal DTKS perlu ada mekanisme yang simple, integrated, komprehensif**
- 2. Perlu adanya Standar mekanisme distribusi yang mempertimbangkan berbagai aspek.**
- 3. Perlu adanya keterlibatan pihak-pihak dari elemen masyarakat yang kompeten serta bebas konflik kepentingan dalam proses awai DTKS hingga tataran eksekusiakhir.**

HATURNUHUN



Nuri Kartini, MT., IPM., AER
Dekan FT UMC

Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 23 April 1972

Riwayat Pendidikan :

S1: Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2005

S2 : Teknik Industri Universitas Pasundan Bandung Tahun 2014

Profesi Insinyur Teknik Industri, Persatuan Insinyur Indonesia Tahun 2018

Riwayat Pekerjaan:

1995- 2006 :PT Avon Indonesia Cirebon, Sekretaris

2006-2009 :PT Indoprofit Konsultama Cirebon, Wakil Pimpinan Cabang

2009-2012 :Universitas Muhammadiyah Cirebon, Kaprodi Teknik Industri

2011-2013 :Technical Consultant Clean Batik Initiative, Ekond

2014 :Sanggar Batik dan Industri Kreatif “Umah Cerdas” Cirebon, Owner

2012-2015 :Universitas Muhammadiyah Cirebon, Sekretaris LPM&LPPM

2015-2017 :Universitas Muhammadiyah Cirebon, Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru

2017-2019 :Universitas Muhammadiyah Cirebon, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu

2019 :Universitas Muhammadiyah Cirebon, Dekan Fakultas Teknik UMC

ANALISA PENGARUH JUMLAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH TERHADAP INDIKATOR EKONOMI MAKRO KOTA CIREBON

Nuri Kartini, MT, IPM, AER
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Cirebon
Email: nuri.kartini@umc.ac.id

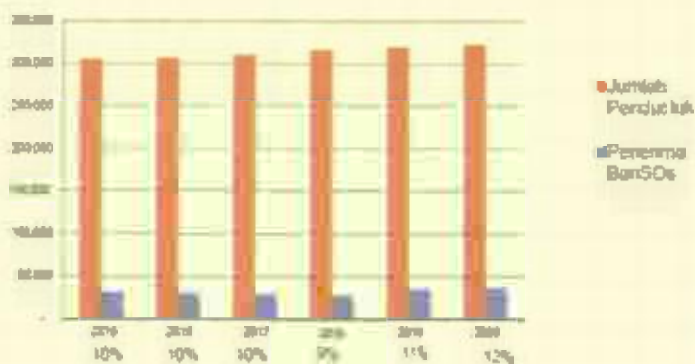
Presesi
Seminar dan FGD Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial
AKN Badan Keahlian Dewan, 26 April 2021

PENDAHULUAN





DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA CIREBON DAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH



Rata2 persingkatan dari tahun 2016-2020 1,33%

INDIKATOR EKONOMI MAKRO KOTA CIREBON

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2	Proporsi Penduduk Miskin (%)
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

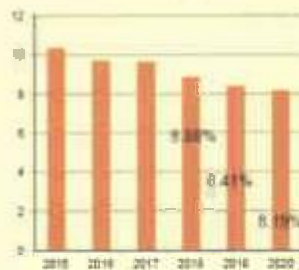
SEBARAN DATA INDIKATOR EKONOMI MAKRO KOTA CIREBON
(2015 – 2020)

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



rata-rata peningkatan 0,03%

2. Proporsi Penduduk Miskin(%)



rata-rata penurunan 0,49%

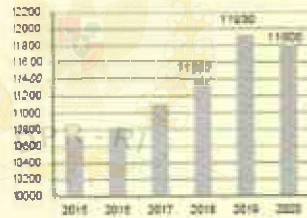
SEBARAN DATA INDIKATOR EKONOMI MAKRO KOTA CIREBON (2015 – 2020)

3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)



rata-rata lulusan SMP

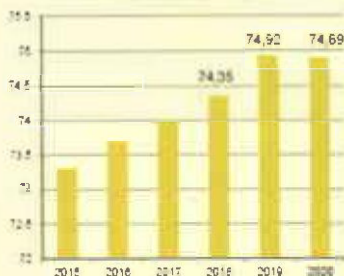
4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)



2019 meningkat 533.000
2020 menurun 130.000

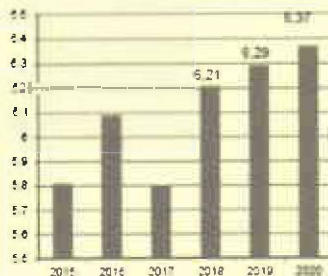
SEBARAN DATA INDIKATOR EKONOMI MAKRO KOTA CIREBON (2015 – 2020)

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



2019 meningkat 0,57%
2020 menurun 0,03%

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)



rata-rata meningkat 0.08%

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISA REGRESI DITINJAU DARI NILAI SIGNIFIKAN				
VAR	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	t Hitung	Nilai Signifikansi	Pengaruh X terhadap Y Tidak Ada Ada
X	Jumlah Penerima Bantuan Sosial			
Y1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	-0.207	0.846 > 0.05	✓
Y2	Proporsi Penduduk Miskin (%)	-1.651	0.174 > 0.05	✓
Y3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	0.812	0.402 > 0.07	✓
Y4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)	1.553	0.105 > 0.08	✓
Y5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15.35	0.200 > 0.09	✓
Y6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1.449	0.221 > 0.10	✓

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISA REGRESI DITINJAU DARI BESARNYA VARIAN		
Var	INDIKATOR EKONOMI MAKRO	Pengaruh Y (%) Pengaruh faktor lain (%)
Y2	Proporsi Penduduk Miskin (%)	40.5 59.5
Y4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (000 Rp)	37.6 62.4
Y5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	37.1 62.9
Y6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	34.4 65.6
Y3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	14.2 85.8
Y6	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.9 98.1

HASIL PENELITIAN

KESIMPULAN	SARAN
1. Ditinjau dari Nilai Signifikan bahwa Tidak Ada Pengaruh yang signifikan antara Jumlah Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap 6 Indikator Ekonomi Makro Kota Cirebon. 1. Ditinjau dari Besarnya Varian, diperoleh prosentase tertinggi yaitu Pengaruh antara Jumlah Penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah terhadap 6 Indikator Ekonomi Makro Kota Cirebon Kurang dari 41% sebesar 2,9% s.d 40,5% dan sekitar 58% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.	1. Diperlukan adanya kajian/penelitian lebih lanjut secara empirik terhadap apa dan mengapa pengaruh Jumlah Penerima bantuan sosial dari pemerintah terhadap indikator ekonomi makro kota Cirebon kurang dari 41% 1. Diperlukan adanya kajian terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi indikator ekonomi makro

TINJAUAN TEMUAN 1

Pemerintah	1. Pihak pemerintah dapat melakukan kajian terhadap aspek berikut terhadap Penerima Manfaat Penerimaan DTKS (Bantuan Sosial) 1. Rupa DTKS 2. Ukuran DTKS 3. Jenis Bantuan 4. Implementasi (Distribusi Bantuan Sosial) 5. Evaluasi 6. Adanya kajian BEFORE AFTER DTKS 7. Adanya kajian BEFORE AFTER Covid-19
Masyarakat	1. Pihak pemerintah melakukan evaluasi secara berkala kepada masyarakat penerima terhadap pemanfaatan bantuan Sosial dari Pemerintah. 2. Pihak pemerintah lebih intensif memberikan sosialisasi dan pendampingan terhadap pemanfaatan Bantuan Sosial dari Pemerintah sesuai dengan Fungsi dan Tujuan dari Bantuan Sosial tersebut
Perguruan Tinggi	1. Tridharma Perguruan Tinggi 2. Perguruan Tinggi dapat terlibat dalam Implementasi Kurikulum MBKM dalam kegiatan seperti: a. Magang, mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan magang di instansi pemerintah b. Proyek Kemandirian c. Membangun Desa/KN Tematik d. Studi Independen

TINJAUAN TEMUAN 2

Tinjauan Faktor

- Mutu Sumber Daya Manusia suatu Daerah (misal: pendidikan dan kesehatan)
- Sumber Daya Alam suatu Daerah
- Tata Kelola
- Kepemimpinan
- Kearifan Lokal



TEF





Drs. Asep Gunawan, M.Si
DekanFE UMC

Riwayat Pendidikan:

S1 Program Studi Dunia Usaha UPI Bandung Tahun 1991

S2 Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Airlangga Tahun 1999

S3 Prodi Manajemen Universitas Jenderal Soedirman (On Going)

Riwayat Pekerjaan:

1992-2002

Dosen DPK di Universitas Muhammadiyah Gresik

2003-sekarang

Dosen DPK di Universitas Muhammadiyah Cirebon

1999-2002

Sekretaris LPPM Universitas Muhammadiyah Gresik

2000-2001

Ketua Dewan pengupahan Kabupaten Gresik Periode 2000-2001

2003-2005

Sekretaris LPPM Universitas Muhammadiyah Cirebon

2006-2007

**Ketua Program Studi Manajemen FE Universitas Muhammadiyah Cirebon
Periode 2006-2007**

2021-2025

**Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon
Periode 2021-2025**

TINJAUAN TERHADAP PENGARUH PEMANFAATAN DTKS DALAM MENUNJANG PENENTUAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DI INDONESIA



Disusun oleh
Drs. Asep Gunawan, M.Si
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Cirebon

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

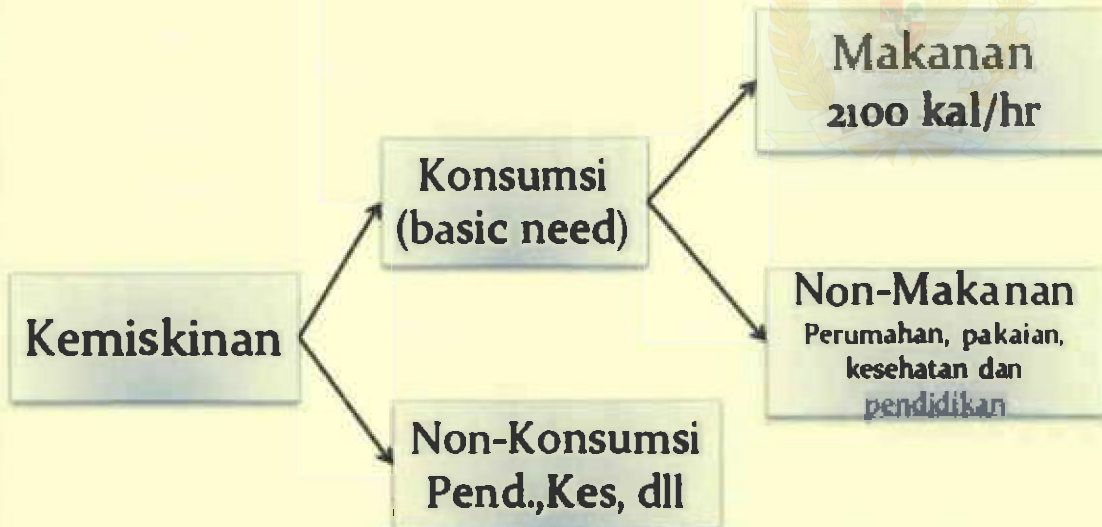
- Basis data (terpadu) untuk penetapan sasaran program program perlindungan sosial/penanganan kemiskinan di Indonesia.
- Permensos RI No. 11 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendataan;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. Penetapan; dan
 - d. Penggunaan.
- Pasal 2 ayat (2): data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
 - b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial
 - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.



Kemiskinan:

Ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (BPS)

**Standar BPS
(Basis Pengeluaran)**



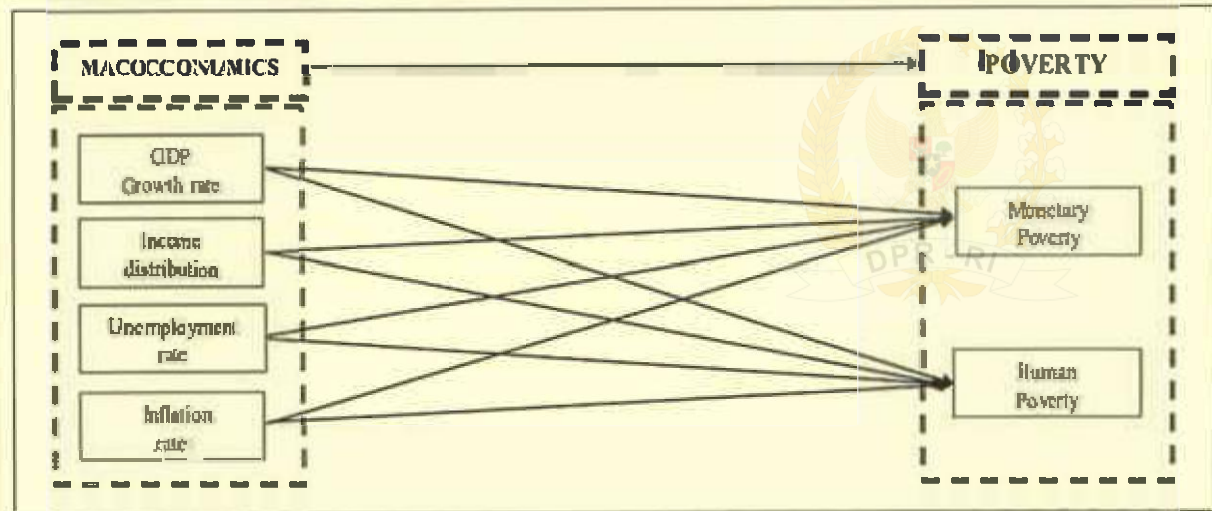
PENETAPAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL



SK Menteri Sosial nomor 133/HUK/2019:
Data terpadu Juli 2019
sebanyak 98.608.619 jiwa berbasis keluarga dan
615.646 jiwa berbasis non keluarga.



DTKS&EKONOMIMAKRO



Sumber: Ainous, 2018



$$\text{PDB} = C + G + I + (X - M)$$

PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2019 DAN 2020 MENURUT PENGELUARAN
 (89,40% PDB Tahun 2020 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi)

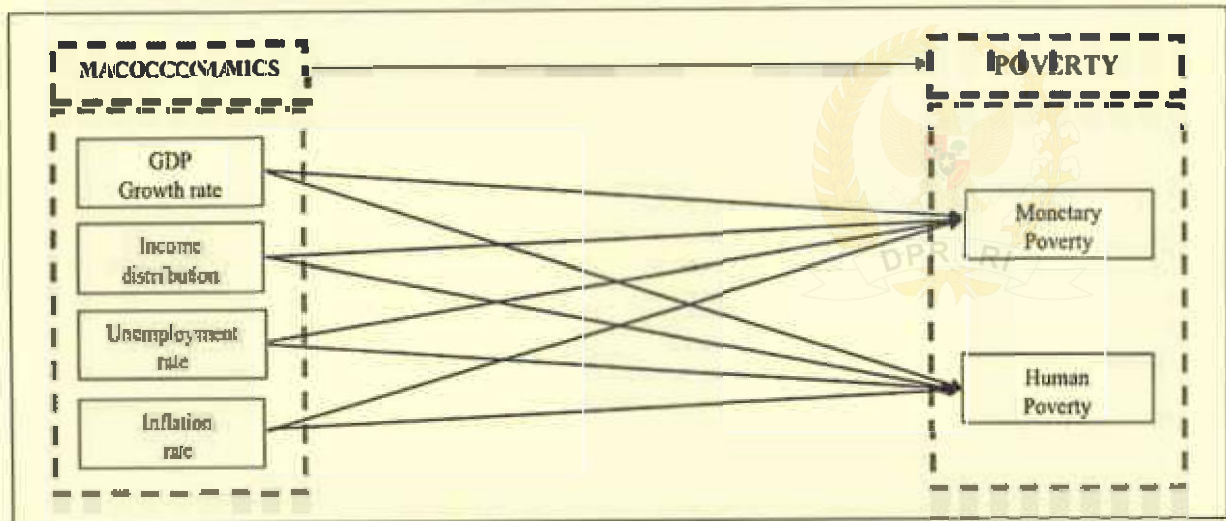


Seluruh komponen tumbuh negatif kecuali Konsumsi Pemerintah

Sumber: BPS, 2021



**Economic growth is the main driver
of poverty alleviation
(Hariadi, 2009)**



Sumber: Ainous, 2018

STRUKTUR EKONOMI INDONESIA 2019

INDONESIA'S ECONOMIC STRUCTURE 2019



LAPANGAN USAHA
Industry

PENGELUARAN
Expenditure



Cakupan Formal & Informal

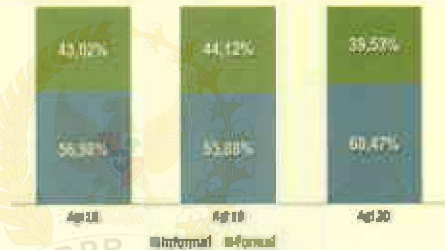
Formal

- Berusaha dibantu penuh tetap
- Buruh/karyawan/pegawai

Informal

- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu penuh tidak tetap
- Pekerja bebas
- Pekerja keluarga/tak dibayar

Persentase Pekerja Formal dan Informal,
Agustus 2018 – Agustus 2020



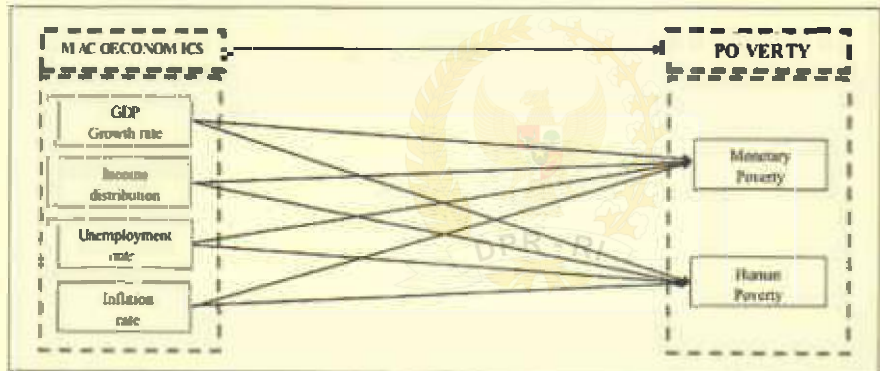
Pekerja formal mengalami penurunan dibanding Agustus 2019 yaitu 4,58 persen pppt, terutama pada buruh/karyawan/pegawai

Pekerja informal naik dibanding Agustus 2019 dengan peningkatan terbanyak pada status pekerja keluarga/tak dibayar

High inequality in the distribution of assets has a significantly negative effect on growth

(Bigsten and Levin (2001))

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

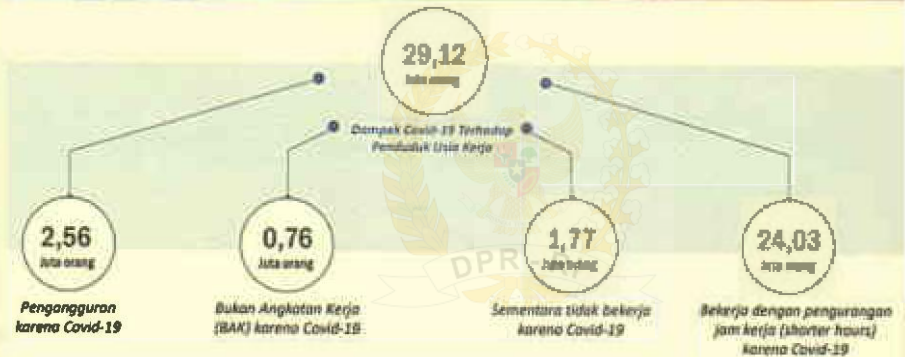


Sumber: Ainous, 2018

Perkembangan Pengangguran di Indonesia



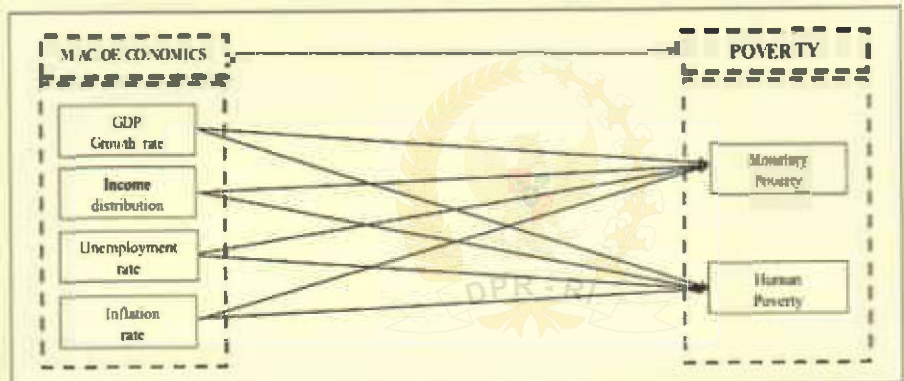
Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja
Agustus 2020



Dari total penduduk usia kerja sebanyak 29,12 juta orang, penanganan penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 sebesar 14,28 persen

Unemployment has substantial and negative impact on poor people (Blank and Blinder, 1985)

TINGKAT INFLASI DAN KEMISKINAN

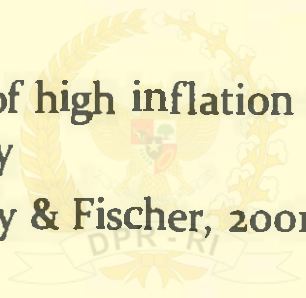


Sumber: Ainous, 2018

Perkembangan Tingkat Inflasi



Keterangan : Inflation (sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana) (Sederhana)



The incidence of high inflation tends to increase poverty
(Easterly & Fischer, 2001).

Powers (1995) finds that inflation dictated use-based poverty measure more during the period of 1959-1992. However, having no critical effect on the income-based poverty rate.



CLOSING STATEMENT

Countries increasing participatory, transparent, and accountable budgetary process generally have stronger effect of fiscal space on poverty and inequality reduction (Blank and Blinder, 1985)



Terima Kasih



Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah., S.E., M.M., Ak.CA.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya
Gunung Jati Cirebon

Tempat, Tanggal Lahir :

Cirebon, 18 Juni 1967

Riwayat Pendidikan :

**S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Padjadjaran Bandung
Tahun 1990**

**S2 Magister Manajemen Universitas
ARS Internasional Bandung Tahun
2020**

**S3 Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi
Akuntansi Universitas Padjadjaran
Bandung (Dengan IPK 3,92 Predikat
Cumlaude)**

Riwayat Pekerjaan :

2010-2012

**Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat
Unswagati Cirebon**

2010-Sekarang

**Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah
IAIN Syekh Nurjati**

2014-sekarang

**Dosen Pascasarjana Magister Ilmu
Administrasi Unswagati Cirebon**

2012-2013

**Kepala Lembaga Penelitian Unswagati
Cirebon**

2013-2021

Dekan Fakultas Ekonomi Unswagati

2021-sekarang

Direktur Sekolah Pascarsarjana UGJ



PELIBATAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG AKURAT DAN MUTAKHIR

Oleh

Prof. Dr. Ida Rosnidah, SE.MM.Ak.CA.
Direktur Sekoiah Pascasarjana UGI

Agenda

Pendahuluan 01

Pembahasan 02

Peran perguruan tinggi sebagai quality assurance pengelolaan
DTKS yang akurat dan mutakhir

Penutup 03



01 PENDAHULUAN

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



Merupakan database yang berisikan data kesejahteraan sosial dengan berbagai kriteria pada setiap Individu dan Rumah Tangga.

Meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan Sosial (Bansos) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Mencakup 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah di Indonesia.

Menuju Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan



Identifikasi

Salah satu tuntutan utama dalam program-program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikutsertaan dan tujuan program.

Ketepatan / Keakuratan

Pada dasarnya ini berarti ketepatanmu ialah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program.

Efektifitas

Efektifitas penutupan sasaran diukur berdasarkan langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan.

Layanan dan Dukungan kepada K/L dan Pemerintah Daerah melalui Data Terpadu



Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah Penyelenggara Program

Kriteria diterapkan kepada Data Terpadu

Daftar nama dan alamat individu / keluarga / rumah tangga sasaran masing-masing program

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dahulu disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya.

DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial.

Landasan Hukum DTKS

UU No 13 Tahun 2011

tentang **Pengamanan**
Faktor Risiko

UU No 23 Tahun 2014

tentang **Pembagian**
Urutan Pemerintahan di
Bidang Sosial

Permenas Nomor 28 Tahun 2017

tentang **Pedoman**
Umum Verifikasi dan
Validasi Data Terpadu
Pengamanan Fakir
Miskin dan Orang
Tidak Mampu

Permenas Nomor 5 Tahun 2019

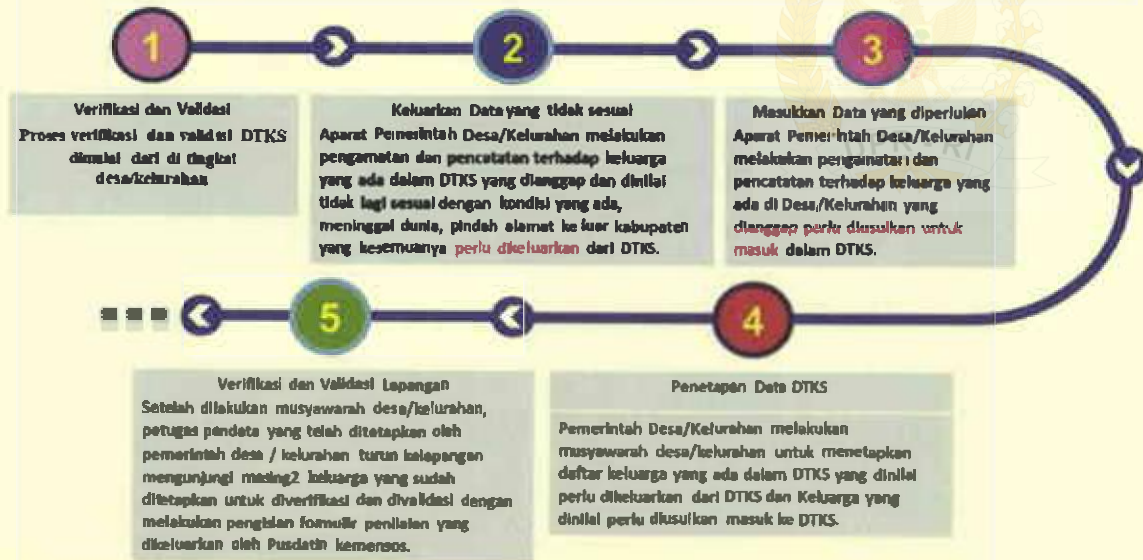
tentang **Pengelolaan**
Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial

Permenas Nomor 11 Tahun 2019

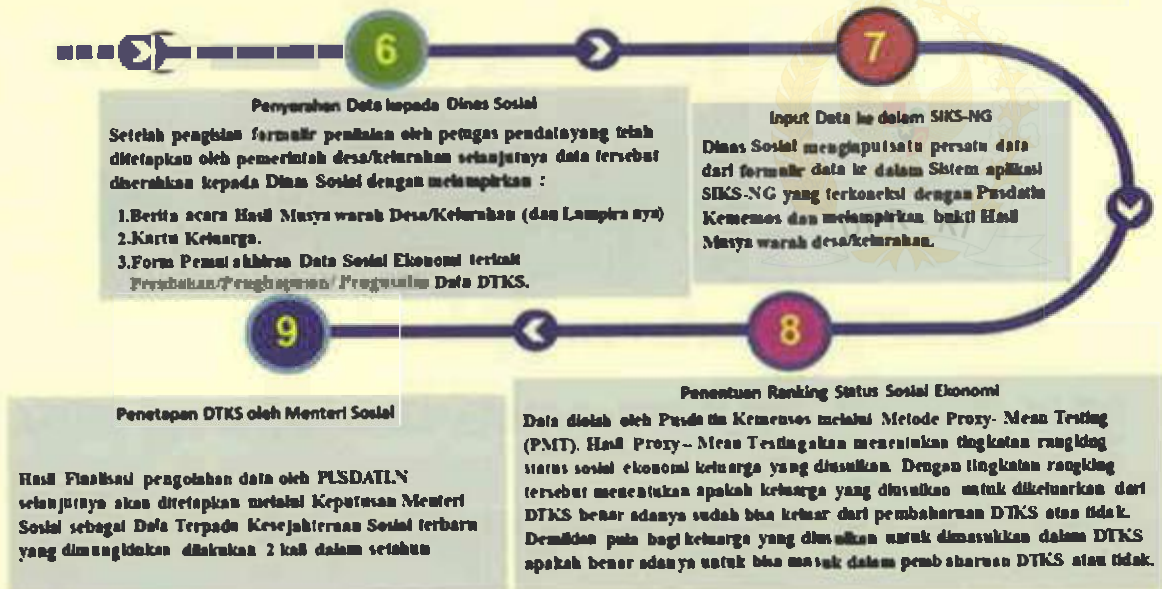
tentang **Perubahan atas**
Permenas Nomor 5
Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan
Sosial

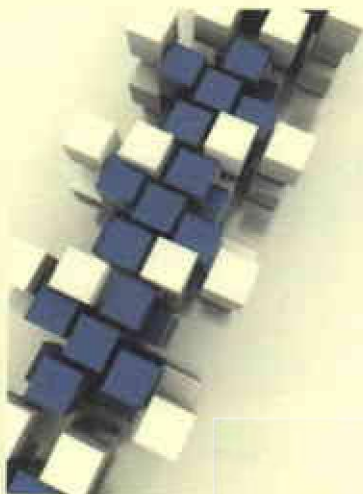


Alur Pendataan dan Pemutakhiran DTKS



Alur Pendataan dan Pemutakhiran DTKS





Akurasi DTKS

Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh **dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga** yang didata dalam mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang ditanyakan dalam formulir pendataan.

Manfaat DTKS

Sesuai Dasar Pemberian Bantuan / Pemberdayaan

Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

UM 13 Bentuknya Rumah Tangga

DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun pengelompokan program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.

Contoh Implementasi Berbasis Keluarga

Adepan bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan.

Contoh Implementasi Berbasis Perorangan

Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Program Bantuan ke Ibu dan Janin, Kewajiban Naisone (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Contoh Penggunaan DTKS



Contoh 1
Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan

Salah satu program perlindungan sosial yang berbasis DTKS adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan kepada keluarga sangat miskin (selis 1) dengan syarat: memiliki tiga rumah/atas, mempunyai dua atau minimal anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan satu memiliki anak usia 10 dan atau MSP (anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar). Jika terdapat dalam keluarga tersebut yang merupakan ahli perantara disabilitas.

Sebagai catatan :
Walaupun dalam suatu keluarga secara nyata tergolong miskin dan masuk dalam DTKS tetapi tidak memenuhi minimal salah satu syarat tersebut maka tidak berhak menjadi sasaran penerima bantuan PKH

Contoh Penggunaan DTKS



Contoh 2
Bantuan Sosial Pangan

Bantuan Sosial Pangan

Demikian pula untuk Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang di dalamnya disebut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) prinsip dasar penetapan sasarnya adalah diprioritaskan kepada keluarga dalam DTKS yang berada pada desil 1 dalam hal ini adalah seluruh penerima bantuan PKH dan jika kuotanya melebihi jumlah penerima PKH maka akan diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam DTKS di luar penerima PKH.

Namun demikian, khusus BSP pangan, sasaran penerima adalah keluarga dalam DTKS tetapi yang belum pernah menerima bantuan sosial jenis apapun karena program BSP pangan adalah secara khusus ditujukan untuk penanganan dampak ekonomi dan Pandemi Covid-19.

Kewajiban Update DTKS

**Pemda
Kab./Kota
Berkewajiban
update DTKS
melalui proses
verifikasi dan
validasi**

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

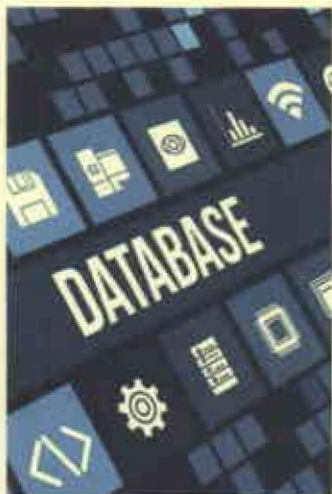
Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data kehir-matan nasional, tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data kehir-matan seluruh daerah provinsi, sedangkan tugas pemerintah daerah kab/kotamadaan pendataan dan pengelolaan data kehir-matan cakupan daerah kab/kota.

Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah kabupaten / kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kab/Kota



02

PEMBAHASAN



Verifikasi Data dan Pemutakhiran Data

Kementerian Sosial RI melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) terus berinovasi untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

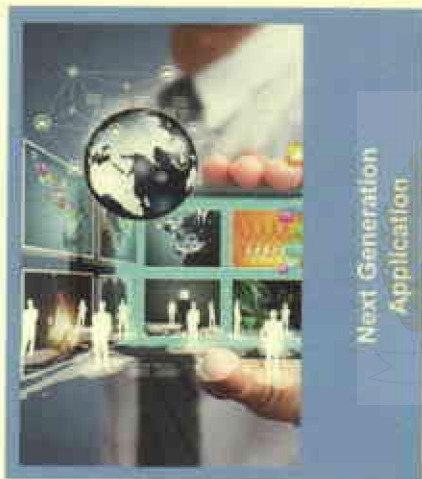
Data kemiskinan bersifat sangat dinamis sehingga pemutakhiran (updating) data semestinya dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya inclusion error ataupun exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial.



Verifikasi Data dan Pemutakhiran Data

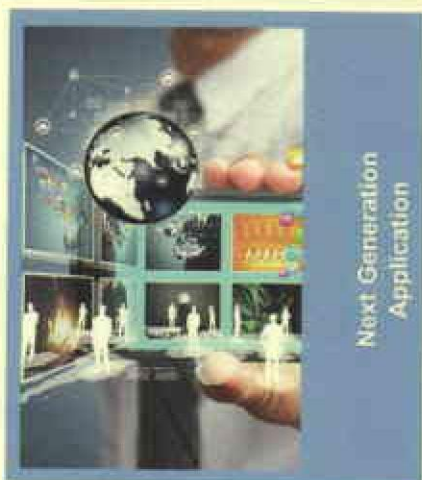
Penting bagi pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan update data dan untuk kepentingan itu mengalokasikan anggaran secara rutin dan memadai serta menyiapkan sumber daya manusia (mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kabupaten/ kota hingga tingkat provinsi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-undang ini mengamandatkan kepada Kemensos untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi dan validasi data, mengelola data tersebut dengan teknologi informasi, dan meningkatkan kapasitas petugas daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data.



Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial mengembangkan **Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)** untuk memudahkan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesos yang mencakup verifikasi dan validasi serta pemanfaatan data.



Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- DROID

Pusdatin Kesos juga telah merilis aplikasi SIKS-NG berbasis android bernama **SIKSDROID** yang mendukung verifikasi dan validasi data terpadu serta monitoring kegiatan pelaksanaan verifikasi dan validasi tersebut.

Sistem ini dapat digunakan secara online maupun offline untuk mengakomodir ketersediaan atau kondisi jaringan internet yang tidak merata.

Kelebihan **SIKSDROID** di antaranya terdapat fitur perekaman lokasi, perekaman lama waktu wawancara di lapangan, serta foto kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Dengan aplikasi ini proses verifikasi dan validasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- DROID

Melalui SIKS-NG versi Android selain diperoleh data sosial ekonomi rupa secara paperless, didapat pula foto kondisi rumah, KTP dan Kartu Keluarga beserta titik koordinat rumah. Saat ini telah terkumpul 35 juta rupa dengan titik koordinat dan foto di 35 kabupaten/kota. Pusdatin dapat memantau aktivitas pemda melalui aplikasi dashboard secara online.

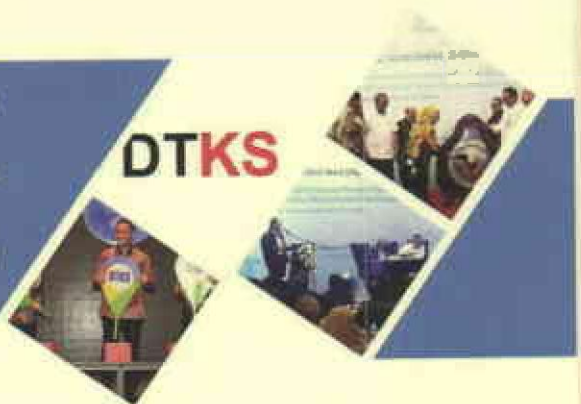
Dengan aplikasi ini maka proses verifikasi dan validasi yang dilakukan pemda menjadi lebih efektif dan efisien

Penyelenggaraan Rakornas

Rakornas bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial.

Hal ini penting untuk mewujudkan data yang akurat, termutakhirkan (up to date) dan terintegrasi dalam satu database.

DTKS

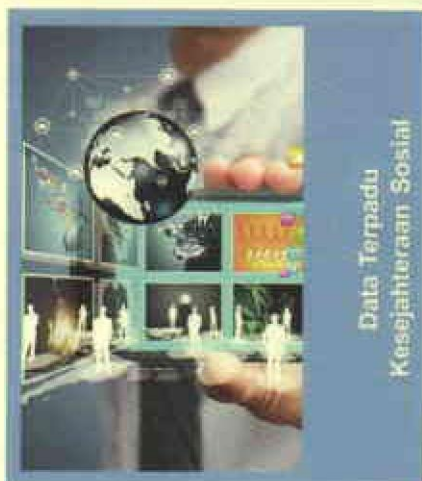




KERJA SAMA KEMENSOS DAN BPS

Kementerian Sosial melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2020. Proses pemutakhiran DTKS harus dirampungkan pada Juli 2021.

Lingkup perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara BPS dengan Kemensos meliputi membuat model pemeringkatan, merancang kuesioner dan melakukan uji coba verifikasi dan validasi, menyusun pedoman pelaksanaan pemutakhiran DTKS, workshop, bimbingan dan pemantapan verifikasi dan validasi, serta jaminan kualitas (quality assurance).



Peran DTKS dalam Menentukan Program Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial tidak lepas dari pengelolaan data dan informasi dalam menentukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan akurat. Selain itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan efektif bila dilaksanakan dengan berdasar kepada data yang berkualitas (evidence-based policy making).

DTKS bisa menjadi data kependudukan yang benar-benar mampu proses penanggulangan kemiskinan. Mewujudkan DTKS yang relabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan.



Peran DTKS dalam Menentukan Program Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial tidak lepas dari pengelolaan data dan informasi dalam menentukan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan akurat. Selain itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan akan efektif bila dilaksanakan dengan berdasar kepada data yang berkualitas (evidence-based policy making).

DTKS bisa menjadi data kependudukan yang benar-benar mampu proses penanggulangan kemiskinan. Mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan.



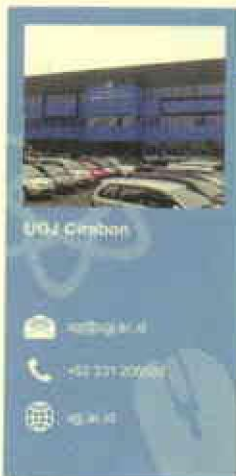
PERAN PT SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DTKS

Relevansi dan Potensi Perguruan Tinggi untuk berperan serta sebagai bagian dari quality assurance pada proses dan pemutakhiran DTKS :

Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satu bentuknya adalah Pengabdian kepada masyarakat sangat relevan untuk memiliki potensi untuk terlibat pada *quality assurance* dalam proses dan pemutakhiran DTKS yang akurat.

Program Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi dapat menjadi sumber SDM dengan jumlah yang besar untuk diberdayakan.

Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud sangat relevan untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan lapangan untuk menunjang proses pemutakhiran DTKS.



PERAN PT SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DTKS

Implementasi Kerjasama Perguruan Tinggi dengan Dinas Sosial berbentuk:

Memberikan ToT kepada Dosen, staf, dan mahasiswa sebagai pembekalan sebelum terjun ke lapangan.

Materi ToT berupa :

- Teknik tata cara pengisian kuesioner
- Teknik wawancara dan teknik menggali informasi,
- Materi lain yang diperlukan.

Memberikan pelatihan kepada aparat Desa / Kelurahan.

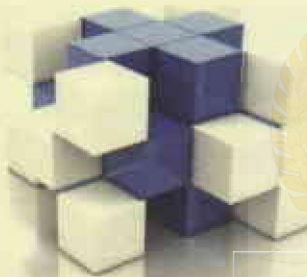
Menerjunkan mahasiswa turun ke lapangan / Rumah Tangga untuk ikut serta melakukan pendataan dan validasi serta verifikasi data

Memberikan pendampingan terhadap aparat desa/kelurahan sejak proses awal verifikasi dan validasi sampai dengan rekapitulasi (termasuk interpretasi) hasil pengamatan dan pencatatan sebelum diserahkan kepada Dinas Sosial.



PERAN PT SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DTKS

Untuk menunjang pelaksanaan program quality assurance pendataan DTKS perlu dilakukan sebagai seluruh Perguruan Tinggi yang dilibatkan oleh Dinas Sosial sebagai implementasi Dharma Pengabdian kepada masyarakat.



03

PENUTUP

Penutup



Dibutuhkan sinergi antara pemda dan PT serta para stakeholder lain untuk mewujudkan DTKS yang akurat dan mutakhir



Melalui DTKS yang akurat dan mutakhir maka akan terwujud efektivitas program bantuan pemerintah karena penerima bantuan yang tepat sasaran



TeRMa KASih ...





Aip Syarifudin, M.PdI Dekan FAI UMC

Tempat Tanggal Lahir: Ciamis, 2 Januari 1984

Riwayat Pendidikan:

S1 Tadris Bahasa Inggris STAIN Cirebon Tahun 2003

**S2 Manajemen Pendidikan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Tahun 2008**

**S3 Pendidikan Islam Kons. Manajemen Pendidikan Islam UIN SGD
Bandung Tahun 2017**

Pengalaman Organisasi dan Jabaran:

2005

**Koordinator Lapangan Youth Centre
PKBI Cirebon/Intervensi Remaja**

2006

KNPI Kota Cirebon

2008

**Pengelola Program/KPA Pemkab
Cirebon**

2009-sekarang

Dosen

2017-sekarang

Dekan FAI UMC

2016-2020

**Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Kota
Cirebon**

2019-sekarang

Wakil Sekretaris Kahmi Kota Cirebon

2020

**Kepala Sekretariat Komisi
Penanggulangan Aids Kabupaten Cirebon**

2020-2024

Sekretaris PKBI Cabang Cirebon



PENTINGNYA LITERASI DIGITAL DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PEMUTAKHIRAN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL

FGD

**PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BK DPR RI**

Aip Syarifudin, M.PdI

Universitas Muhammadiyah Cirebon

LITERASI DIGITAL

Pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari

LITERASI DIGITAL

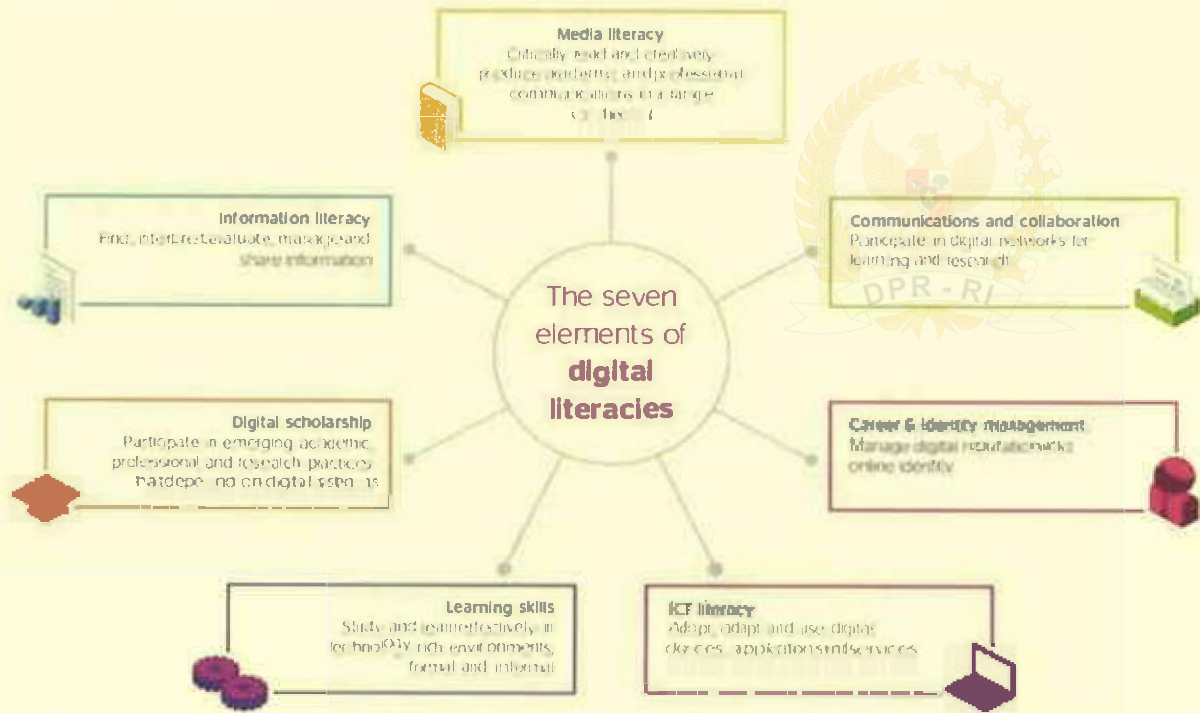


Fitur Literasi Digital

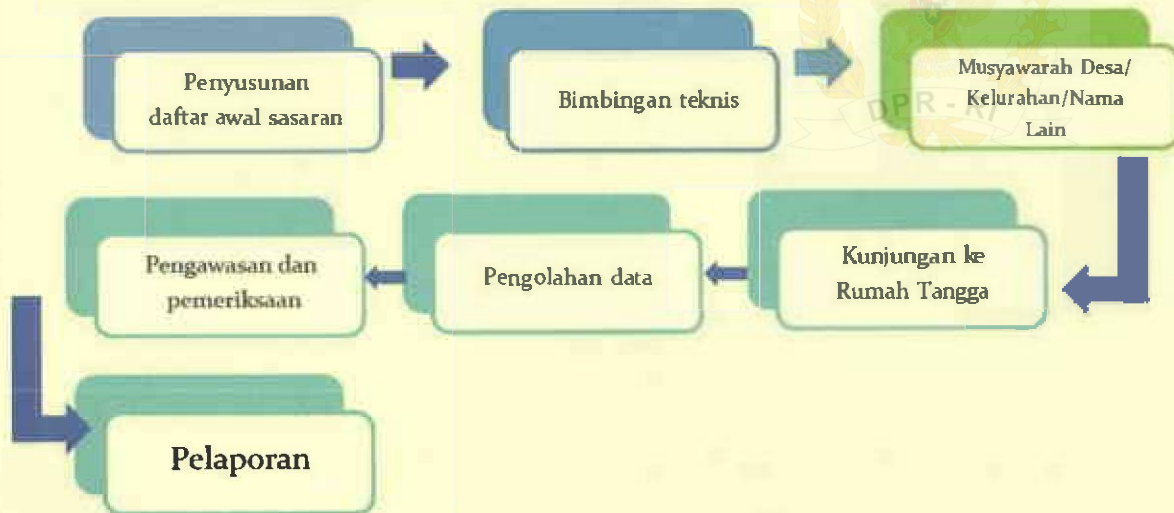
Indikator Literasi Digital (Digital Skills) menurut UNESCO, 2012



Tujuh Elemen Literasi Digital menurut Beetham, Little John dan Mc Gill (2009)



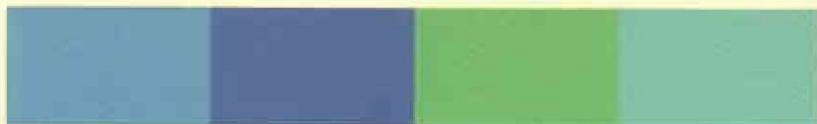
Mekanisme Verval Data Terpadu (Permensos 28 Tahun 2017)



Data Terpadu Kesejahteraan Sosial



BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)



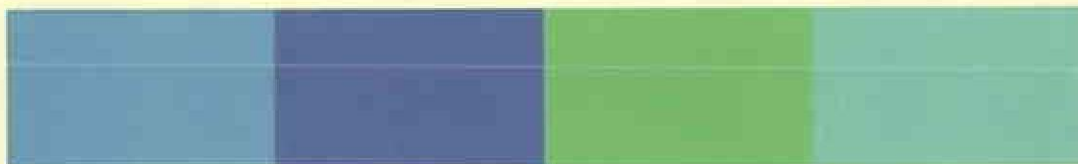
PKH (Program Keluarga Harapan)

VALIDASI

PKH

E-PKH

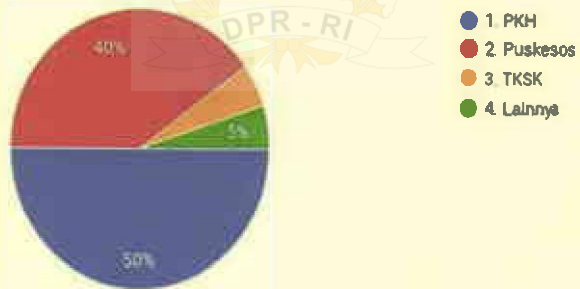
Peserta E-PKH



RANDOM SAMPLING

Katagori

20 jawaban



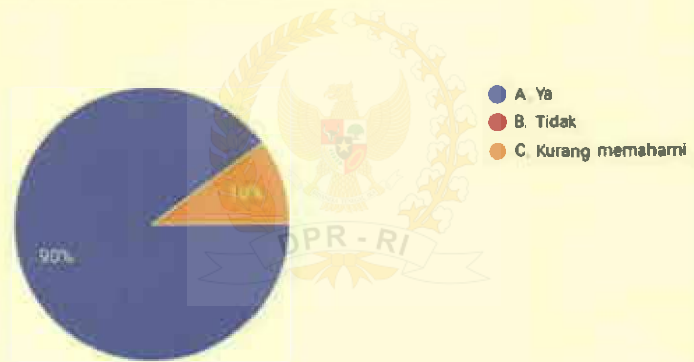
1. Berapa persen anda meyakini bahwa DTKS berisikan data-data valid, akurat, dan data baru ?

20 jawaban



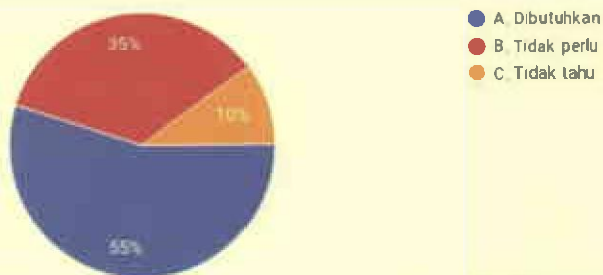
2. Apakah anda memahami cara update data melalui SIKS-NG ?

20 jawaban



3. Apakah dibutuhkan peran perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat tentang masalah sosial, membahas teknis updating data, memberikan pelatihan TIK (teknologi, komunikasi kepada para pemutakhir data/PKH dll).

20 jawaban



PPROBLEM

Kurangnya Bimtek bagi para pemutakhirdata

Mayoritas belum Menikmati pemanfaatan DTKS

Potensi intervensi politik

Pemutakhirdata singkronisasi belum terlaksana dengan baik

Basisedata yang sudah terlalu lama, sehingga bebanverval sangat berat
Data Lamars MappingUlang

Regulasi yang belum terimplementasi dengan Baik

Kelengkapan jenisdata dalam DTKS
(K omprehensifitas)

Keseriusan Pemerintah dalam pelibatan Perguruan Tinggi terkait DTKS

?

Kontribusi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi

Dosen

Mahasiswa

MBKM



Salah satu kontribusi perguruan tinggi adalah melalui penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan masyarakat.

Salah satu kontribusi perguruan tinggi adalah melalui penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan masyarakat.

Salah satu kontribusi perguruan tinggi adalah melalui penelitian yang menghasilkan karya ilmiah yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan masyarakat.



"Kesejahteraan memberikan peringatan, sedangkan bencana memberi nasihat". (Socrates)

TERIMA KASIH



Rochmat Hidayat, S.IP, MA

**Dosen FISIP Universitas
Muhammadiyah Cirebon**

Pendidikan Terakhir:

**S2 Master Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
(Beasiswa BPDDN Dikti Tahun 2010)**

Pekerjaan:

**Dosen Tetap Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas
Muhammadiyah Cirebon**

Kuwu Klangeran Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon

Literacy Digital dalam Pemutahiran Data Terpadu Kesejahtraan Sosial



Rochmat Hidayat, S.IP.,MA

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMC

Literacy Digital dalam Pemutahiran Data Terpadu Kesejahtraan Sosial

Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul *Digital Literacy* (1997), literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam bentuk digital dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer dan teknologi informasi. Bawden (2001)

LITERASI DIGITAL DALAM Government Public Relations

PENYAMPAIAN

(diseminasi/berbagai informasi kebijakan publik kepada masyarakat (top down approach)

PENYERAPAN

aspirasi masyarakat terhadap berbagai macam isu yang terkait dengan kebijakan publik (bottom up approach)

LEGITIMASI

(keabsahan) pemerintah dalam mengelola kebijakan publik

PERPRES NO. MOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

government PUBLIC RELATION

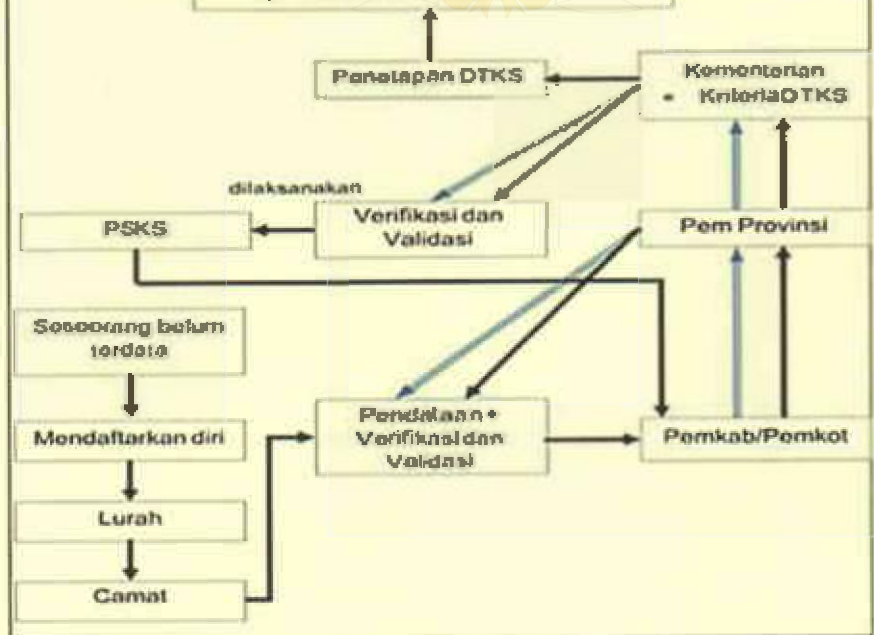
PENYAMPAIAN
(diseminasi) berbagai
informasi kebijakan publik
kepada masyarakat (top
down approach)

PENYERAPAN
aspirasi masyarakat
terhadap berbagai macam
isu yang terkait dengan
kebijakan publik (bottom
up approach)

LEGITIMASI
(keabsahan)
pemerintah dalam
mengelola kebijakan
publik

Penggunaan Data

- Sumber Data Utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Dapat digunakan oleh
 - a) Kementerian/Lembaga,
 - b) Pemerintah Daerah.



PERMENSOS NO 5/2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial



Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Profil Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

- Pekerja sosial
- Asisten pekerja sosial
- Pendamping sosial
- Pekerja sosial masyarakat
- Tenaga kesejahteraan sosial/kemasyarakatan
- Taruna siaga bencana
- Penyuluh sosial masyarakat
- Tenaga pelopor perdamaian

PSKS Keluarga

- KPM program Bantuan Sosial yang sudah mampu
- keluarga yang mampu dan mau berkontribusi

PSKS Lembaga

- Karang taruna
- Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
- Lembaga peduli keluarga

Ministry of Social Affairs
Kementerian Sosial RI

Directorate of Social Welfare
Direktorat Kesejahteraan Sosial

Unit of Social Potential and Source
Unit Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial



PENYAMPAIAN
(diseminasi) berbagai informasi
kebijakan publik kepada
masyarakat (top down approach)

Masalah

1. DTKS Menjadi informasi final yang berisi data baku yang sulit diubah
2. Informasi Tentang DTKS diakses oleh segmen terbatas
3. Jikapun ada mekanisme perubahan data maka informasi yang disampaikan dengan logika teknis pemerintah pusat dan tidak adaptif dengan kondisi lokalitas

STATISTIK DTKS PER OKTOBER 2019



Berkas Informasi Sosial Ekonomi rumah tangga dan perekonomian terpadu yg meliputi rumah tangga miskin dan tidak mampu serta PMS yg tinggal di luar Rumah Tangga, keluarga dan individu.



Digunkan dan program perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sasaran dalam penurunan angka kemiskinan.



Komplementaritas program perlindungan sosial

SIKS-NG MODUL PBI-JK

Edit Detail

NAMA PESERTA DIDIK

MATERI

WAKTU

TEMPAT

Simpan **Kembali**

Pengantar

No	Nama	Materi	Waktu	Tempat
1	Muhammad Ridwan	Pendidikan	15 menit	Kelas
2	Muhammad Ridwan	Pendidikan	15 menit	Kelas
3	Muhammad Ridwan	Pendidikan	15 menit	Kelas
4	Muhammad Ridwan	Pendidikan	15 menit	Kelas
5	Muhammad Ridwan	Pendidikan	15 menit	Kelas

SIKS-NG MODUL BANTUAN SOSIAL PANGAN

[illegible]

PENYERAPAN

Aspirasi masyarakat terhadap berbagai macam isu yang terkait dengan kebijakan publik (bottom up approach)

Masalah

1. Masyarakat belum mendapatkan literasi yang cukup tentang kriteria status miskin dan gambaran program penanggulangan kemiskinan
2. Masyarakat sangat pragmatis dengan gambaran program yang akan diterima
3. Faktor psikologi sosial yang kompleks di level micro (desa) yang mempengaruhi informasi objektif pendataan
4. Masyarakat dan pemerintah terbawah desa, terputus akses informasi terhadap mekanisme penetapan data

VARIABEL DATA PPKS TINGGAL DI RUMAH TANGGA



**dan Sumber
Kesejahteraan
Sosial
(PSKS)**

- Pekerja sosial
- Asisten pekerja sosial
- Pendamping sosial
- Pekerja sosial masyarakat
- Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
- Taruna siaga bencana
- Penyuluh sosial masyarakat
- Tenaga pelopor perdamaian

POPE GILBERT

- KPM program Bantuan Sosial yang sudah mampu
- keluarga yang mampu dan mau berkontribusi

- Karang taruna
- Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga
- Lembaga peduli keluarga



PERMENSOS No 5/2019
TENTANG PENGELOLAAN DTKS





LEGITIMASI (keabsahan) pemerintah dalam mengelola kebijakan publik

Tabel 1
Rendahnya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan OTK

Kategori	Tingkat-Persepsi		
	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Persepsi Masyarakat
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1
Pengelolaan	1	1	1

Masalah

1. Tidak ada akses yang terbuka terhadap mekanisme penelapan data di pusat
2. Informasi dan Pemutakhiran data di level bawah tidak serta merta menjadi dasar penentuan

Siklus Penerbitan SK Mensos terkait Data



UU No 13/2011: PENANGANAN FAKIR MISKIN



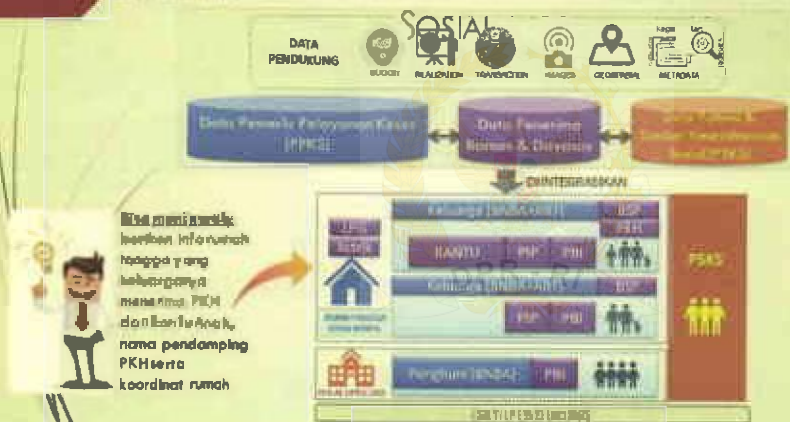
UU No. 23/2014: TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



CONTOH KOMPLEMENTARITAS PROGRAM



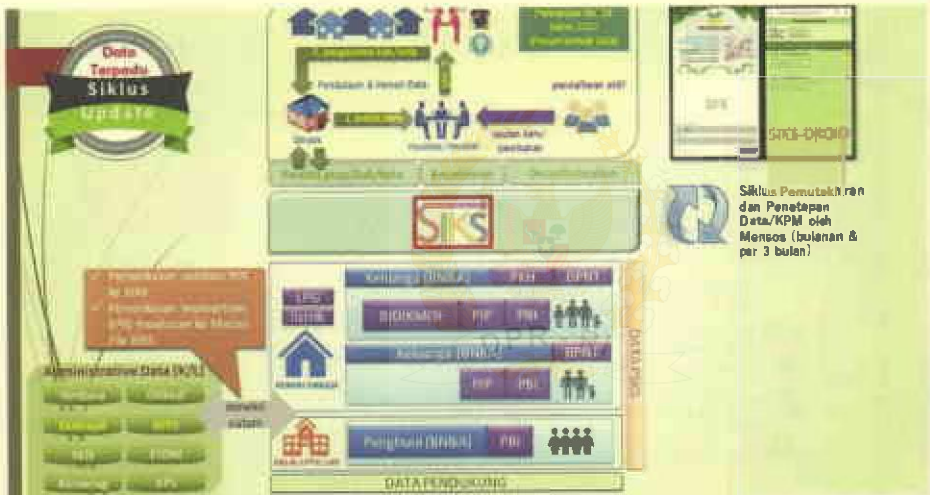
PEMBENTUKAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN



Untuk memastikan
keakuratan informasi
tersebut yang
kemungkinan
menerima PKK
dan lain-lain, maka
nama pendamping
PKK serta
koordinat rumah

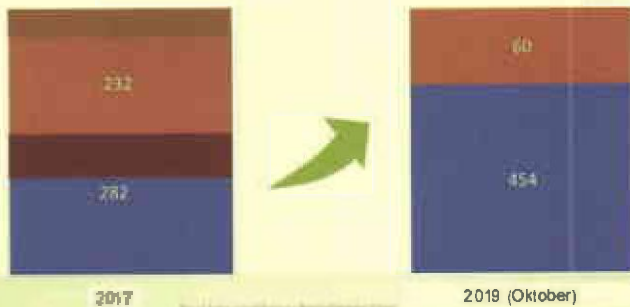
Dengan Satu Aplikasi:
Sistem Informasi
Sosial
Next Generation
(SIKS-NG)

Mekanisme Pengelolaan DTKS



KEAKTIFAN VERIFIKASI & VALIDASI PEMDA

■ Aktif (impor data ke SIKS) ■ Tidak aktif





Dr.Badawi.SE.,M.Si
Wakil Rektor II UMC

TTL : Kapetakan, 19-03-1972

Riwayat Pendidikan :

S1 Manajemen Universitas Dr.Soetomo Surabaya Tahun 1998

S2 Manajemen Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Tahun 2007

S3 Manajemen Universitas Brawijaya Malang Tahun 2011

Riwayat Kepemimpinan Publik :

Komisaris/Dewan Pengawas PD BPR ClwaringIn,Pemprop Jabar dan Pemda Kab.Cirebon

Komisaris/Dewan Pengawas PD BPR Astanajapura,Pemprop Jabar dan Pemda Kab.Cirebon

Komisaris/Dewan Pengawas PD BPR Waied,Pemda Kab.Cirebon

Komisaris/Dewan Pengawas PD BPR Astanajapura hasil Marger, Pemprop Jabar dan Pemda Kab.Cirebon



PERAN DTKS DAN PENANGGULANAGAN KEMISKINAN : KONSEP, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM



Badawi

PERMASALAHAN

- ☐ Dampak masa pandemi Covid-19, membawa berbagai permasalahan terutama dengan data.
- ☐ Perdebatan validasi kualitas data sampai sekarang masih belum ada solusi
- ☐ Permasalahan data kemiskinan, secara regulasi merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembaruan data
- ☐ Pengentasan kemiskinan ikut menjadi isu strategis dan fokus utama

Prosentase Penduduk Miskin Tahun 2019-2020 Se-Wilayah Cirebon

NO	KABUPATEN /KOTA	2019	2020	SELISIH
1	Indramayu	11,11	12,70	1,59
2	Kuningan	11,41	12,82	1,41
3	Majalengka	10,06	11,43	1,37
4	Kabupaten Cirebon	9,94	11,24	1,30
5	Kota Cirebon	8,41	9,52	1, 11

Terjadi pertumbuhan jumlah penduduk miskin rata-rata sebesar 1,11 – 1,59 antara tahun 2019 dan 2020. Pertumbuhan ini lebih banyak disebabkan oleh pandemi Covid 19. Jumlah tertinggi di ambil oleh Kabupaten Indramayu dengan tingkan kenaikan penduduk miskin cukup tinggi sebesar 12,70 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dan diikuti oleh Kuningan, Majalengka, Kabupaten Cirebon dan yang terendah adalah Kota Cirebon.

DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

“ merupakan data yang digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program perlindungan sosial. DTKS membantu dalam perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial”

Pengelolaan DTKS melibatkan dari berbagai instansi pusat (Kemensos, Kemendagri, Kementerian Keuangan), pemerintah pada pada level propinsi juga pemerintah kabupaten/kota yang diharapkan dapat menciptakan harmonisasi

DTKS DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ❑ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya dengan menggunakan Metode Proxy-Mean Testirig (PMT).
- ❑ Perhitungan DTKS mencakup tingkat kesejahteraan secara nasional maka sebaran persentase penduduk 40% tersebut tidak sama atau bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia
- ❑ Cakupan 40% juga meliputi kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Sedangkan rumah tangga yang berada pada kelompok 40% ke atas sudah dianggap Mapan dan sudah mampu memberdayakan dirinya sendiri

SEJARAH

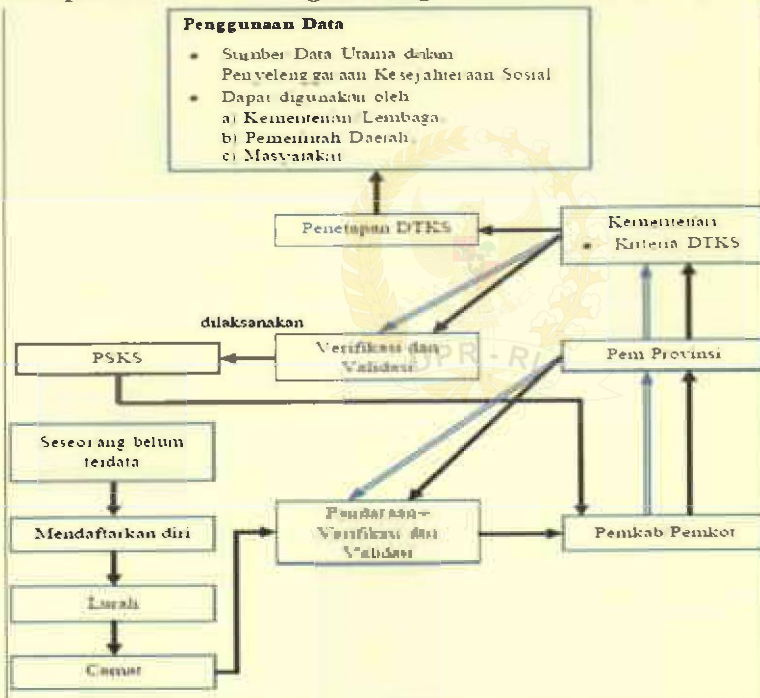
Sejak tahun 2010 Kementerian Sosial telah membangun dan mengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang dibangun dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Data dalam BDT dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 BDT memuat nama dan alamat (by name by address) sekitar 40 persen

Data dalam DT PPFM merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) yang dilakukan oleh BPS tahun 2015 dan pemutakhiran oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) secara berkala setiap enam bulan sekali

Kepmensos No.30/HUK/2017 telah membentuk tim pengelola lintas K/L yang disebut Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data Terpadu). Pokja terdiri dari enam unsur K/L.

Tahapan dan Kewenangan Pengelolaan DTKS



DTKS digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan

PROGRAM BERBASIS KELUARGA

- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Sosial Pangan

BERBASIS PERORANGAN

- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN),
- Kartu Prakerja
- Kartu Indonesia Pintar
- bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia

DAMPAK DTKS TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• Hasil penelitian Nainggolan (2019)

“ Basis intervensi PKH belum menyentuh anggota keluarga secara keseluruhan, dimana peserta program hanya kaum ibu sebagai pengurus tidak melibatkan suami PKH belum mengawasi ketimpangan gender keluarga penerima manfaat dimana tidak mengubah relasi perempuan penerima PKH dengan suaminya ”

Penelitian Rahmawati & Kiswanto (2017) di Kecamatan Semarang Timur, terdapat faktor penghambat internal meliputi **sulitnya peran serta penerima PKH dalam mengumpulkan berkas pemutakhiran data, serta disiplin peserta dalam pertemuan** Adapun penghambat eksternal meliputi **informasi program yang sifatnya mendadak, jarak tempuh pendamping yang jauh, dan akses jalan yang sulit terjangkau, direkomendasikan agar jumlah pendamping bisa ditambah**

Utomo, dkk (2014) tentang pelaksanaan PKH di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Kediri menyimpulkan bahwa PKH membantu masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup untuk pendidikan anaknya serta kesehatan ibu hamil dan balita. Penerima PKH juga bersedia memenuhi komitmen karena takut sanksi yang diberikan

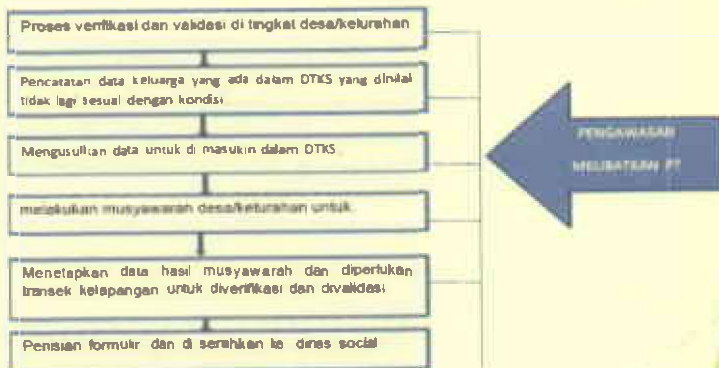
Hidayat (2018) tentang optimalisasi PKH di Kecamatan Pulau Pangung bahwa bantuan PKH membantu mengurangi beban ekonomi terutama pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah seperti uang bulanan, buku, seragam serta alat tulis. Bantuan dengan demikian PKH dipandang meningkatkan pendidikan anak, sehingga mengurangi pekerja anak, anak jalanan, serta putus sekolah

tsidjoso, dkk (SMERU, 2018) juga menunjukkan bahwa PKH membantu pemenuhan biaya pendidikan dan kesehatan, konsumsi, serta kehidupan yang lebih layak. Secara umum penerima PKH dianggap cukup tepat sasaran, namun jumlahnya lebih kecil dari kebutuhan. Beberapa yang perlu ditingkatkan adalah transparansi jumlah dana, larangan pemotongan dana, atau memberikan dana kepada pendamping maupun aparat. Sosialisasi kewajiban penerima PKH masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait kesehatan, untuk pencairan dana sebaiknya juga disesuaikan dengan kalender pendidikan. Keterpaduan dengan program lain juga perlu ditingkatkan

EVALUASI DAN PEMBAHARUAN DATA DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Pengolahan dan pemutakhiran data, merupakan hal yang esensial karena semua keberhasilan program bergantung dari baik atau buruknya data. Hal ini terlihat dari Sumber masalah utama program penanggulangan kemiskinan adalah banyak data salah sehingga sasaran program menjadi kurang tepat bahkan menimbulkan konflik di masyarakat.
- Masalah sistem, maka sebaiknya otoritas verifikasi dan validasi data sebaiknya diserahkan kepada daerah, kabupaten maupun provinsi, meskipun indikator kemiskinan masih tetap menjadi kewenangan pusat.
- Perbaiki database kemiskinan dengan mendelegasikan kewenangan sampai tingkat bawah, serta memadukan berbagai sumberdaya. Selanjutnya dibentuk tim **INDEPENDEN DI TINGKAT DESA DENGAN MELIBATKAN PERGURUAN TINGGI** dan kewenangan terhadap perubahan data.

TAHAPAN PROSES EVALUASI DAN PEMBAHARUAN DATA DI TINGKAT DESA DENGAN MELIBATKAN PERGURUAN TINGGI



KESIMPULAN

Peran DTKS konsep dapat dijadikan data utama yang terpadu untuk membuat program penanggulangan kemiskinan. Namun diperlukan pembaharuan data dalam setiap satu atau dua tahun.

Implementasinya DTKS memiliki peran dalam menanggulangi dan menurunkan kemiskinan hari ini terlihat dari hasil-hasil penelitian dari tahun 2017-2020 yang menunjukkan bahwa program melalui data DTKS dapat menurunkan kemiskinan dan efisiensi.

Pelibatan perguruan tinggi sangat diperlukan untuk memastikan tingkat validasi dan keakuratan data sesuai dengan kondisi yang ada dalam bentuk pengawasan verifikasi. Pelibatan PT juga bertujuan agar menghilangkan penilain dan penelapian subyektifitas kepala Desa atau Lurah.

DAFTAR PUSTAKA

- BKBN, 2003. Tentang Rendahnya Pna berk.B. Jawa Tengah: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Download pada tanggal 25 April 2012. <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/11/102/05/0312/htm> : 25)
- Habibullah, Sugiyanto, Sripu, A., Imayanti, N. R., Susantyo, B., Mujiyudi, B., Nalnggolan, T. (2017). Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI – Jakarta
- Hidayat, S. (2018). Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis 2018. IIB Damuljaya, Bandar Lampung, Hal 194-202
- Isdijoso, Widjanti, Hastuti, M., Mawardi, Sri Budiyati, S., Rosfadhila, M., Febrany, V & Sodo, R. J. (2018). Penerima Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan. Studi Kasus Tiga Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Laporan Penelitian SMERU Tahun 2018. <http://smeru.or.id/id/content/monitoring-rumah-tangga-sasaran-rts-penerima-program-bantuan-pemberda>
- Nalnggolan, T. (2019). Aspek Gender Dalam Program Keluarga Harapan. Gender Aspects In The Hope Family Program. SosioInfoma Vol.6, No. 01, Januari - April, Tahun 2019
- Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Permenkos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Rahmawati, E., Naworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. Journal of Nonformal Education and Community Empowerment. Volume 1 (2), 161-169, Desember 2017. <http://ejournal.unsida.ac.id/index.php/edepot>
- Saraswati, A. (2018). Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penguasaan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Pada Rekori Pandanguraj Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu), Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, Lampung. <http://eprints.uinradenintan.ac.id/13022/1/Analisis%20Pengaruh%20PKH.pdf>
- Tirani, O. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Dinas Sosial Kabupaten Poso. Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 6, Juni 2017. <http://jurnal.katalogis.com> : 1-20-17)
- Utomo, D., Hakim, A & Ribawanto, H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, Hal. 26-34 (2014)
- Isnani, R. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karang Rejo Kecamatan Negeri Unken Kabupaten Pesisir Selatan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Benar Lampung
- Syahrani. (2016). Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Menjangkau Penghasilan Rendah Kurang Mampu di Desa Marioraja Kecamatan Marioraja Kabupaten Sepahang Bengkulu. Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Majalengka. <http://eprints.unma.ac.id/4423/1/syahrani.pdf>

Peran DTKS Dalam Menekan Pemborosan Keuangan Negara dan Menurunkan Tingkat Kemiskinan Wilayah



Puspa Dewi Yulianty, S.Pd., M.M

DASAR HUKUM DTKS

Dasar hukum dari DTKS adalah UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang Sosial, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Juga Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan Permensos Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Konsep DTKS

Pengelolaan Data

Pendataan

Verifikasi Data

Validasi Data

Faktor Risiko

Orang Tidak Mampu

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

(Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Isu dan Tantangan Penerapan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan layanan kesejahteraan sosial oleh komitmen politik dan pengurusan.

Akuntabilitas Pelaksana Program yang belum terukur

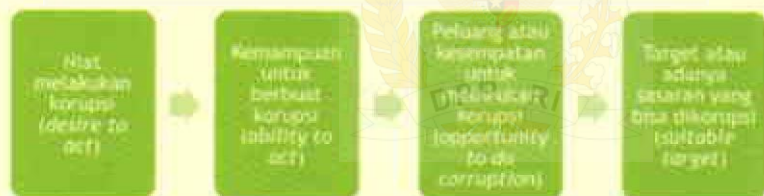
Pembiayaan layanan sosial

Kepatuhan

Kurangnya pendanaan di tengah meningkatnya permintaan dan meningkatnya kebutuhan kesejahteraan sosial.

(Yusrizal, 2021)

4 (Empat) Unsur Perbuatan Korupsi



(Bibit S. Riyanto, K : 2009)

Belanja Bantuan Sosial



Analisis Problem Fiskal

Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional di daerah,

Tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,

Belanja pemerintah Pusat dan Daerah yang berasal dari APBN dan APBD.

Amanah UUD dan UU Tentang Kemiskinan

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 (1) yang berbunyi "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Yang mana ketentuan ini lebih dipertajam lagi dalam Undang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di mana negara memiliki kewajiban dan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Konsep Kemiskinan

- Menurut BPS bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.
- Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: (1) kemiskinan (proper); (2) ketidakberdayaan (powerless); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency); (4) ketergantungan (dependence); dan (5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Dasar Kemiskinan

- ⌢ Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
- ⌢ Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- ⌢ Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
- ⌢ Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- ⌢ Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- ⌢ Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
- ⌢ Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- ⌢ Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance);
- ⌢ Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

(World Bank, 2006)

Penyebab Kemiskinan Di Pedesaan



(Chriswardani, 2005)

Determinan Kemiskinan



(Azwar dan Subekan, 2016)

Penanggulangan Kemiskinan



(Hureirah, 2005).

Masalah Pemborosan Keuangan



(CNBC, 2020)



Solusi Kebocoran Anggaran Dana Sosial

Data Penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data.

Melakukan verifikasi dan validasi Proses data fakir miskin berkala.

Membangun Kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antar Lembaga agar tepat sasaran, efektif dan efisien.



Elya Kusuma Dewi, S.H., M.H.
Dekan FH UMC

Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 8 Mei 1981

Riwayat Pendidikan :

S1 : Fakultas Hukum Uil

S2 : Magister Hukum Unswagati Cirebon

S3 : Doktorat Ilmu Hukum 2020-blm selesai



TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN DTKS

Oleh: Elia Kusuma Dewi, SH., MH
Dekan FH Universitas Muhammadiyah Cirebon
2021

Dasar Hukum

- Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Permensos Nomor 5 Tahun 2019 dan Permensos Nomor 28 Tahun 2017.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011:

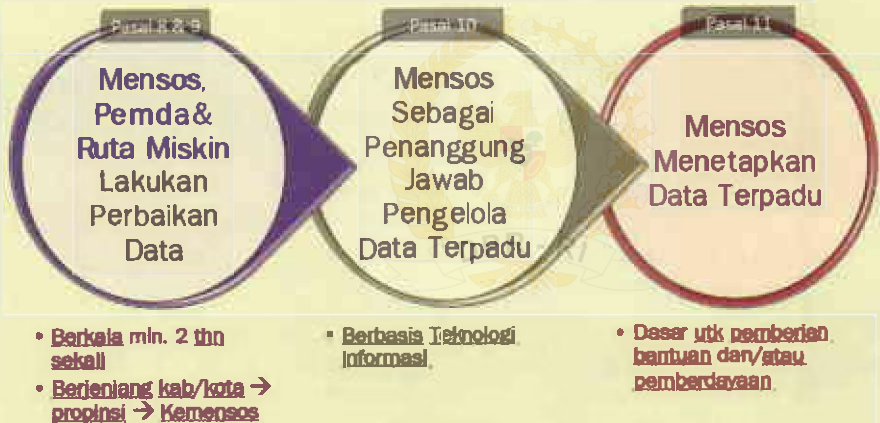
(1) Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

(2) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada :

- Pasal 8 & 9 : Verifikasi dan validasi rumah tangga miskin oleh Menteri, Bupati/Walikota, dan Masyarakat
- Pasal 9 ayat 1 - 5 : Pendaftaran aktif Fakir Miskin
- Pasal 10 ayat 1 : Data Terpadu menjadi tanggung jawab Menteri dengan berbasis TIK.
- Pasal 10 ayat 3 : Pemanfaatan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat
- Pasal 11 ayat 2 : Data terpadu yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk membenarkan bantuan dan/atau pemberdayaan
- Pasal 36 : Sumber Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain
- Pasal 42 : Pidana pemalsuan data verifikasi dan validasi

UU No 13/2011: PENANGANAN FAKIR MISKIN



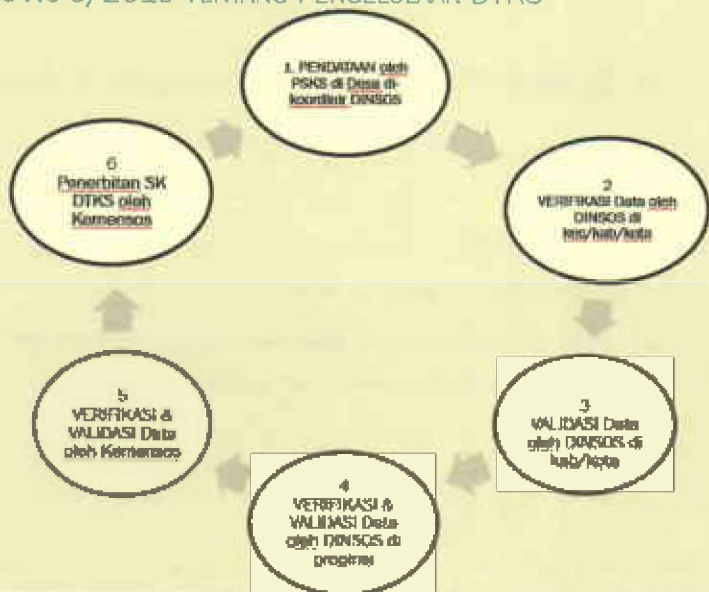
UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada

- Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom 3, yaitu : Pengelolaan Data Fakir Miskin Nasional oleh Pemerintah Pusat.
- Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom 4, yaitu : Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah provinsi oleh Pemerintah Provinsi.
- Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom 5, yaitu : Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

UU No. 23/2014: TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



PERMENSOS No 5/2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS



- Case** REPUBLICAN



References

Digitized by Google





Permasalahan di lapangan :



Saran

- Dasar hukum atau aturan yang mengatur pengelolaan DTKS agar diperkuat dengan sanksi/reward serta ketegasan dalam penegakan hukumnya
- Sosialisasi aturan pengelolaan DTKS kepada masyarakat (agar masyarakat mengetahui alur dan bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada pemalsuan data/sebagai salah satu bentuk control dari masyarakat);
- Adanya lembaga lain yang memonitoring terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Contoh permasalahan data yang tidak diperbaharui :

- Zahid Ahmad Faiz mengatakan pada dasarnya BST ini sangat relevan bagi masyarakat DIY yang terdampak Covid-19. Namun sayangnya dalam penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran. **BACA JUGA: Aktivitas Gunung Sindoro Meningkat Sebab ada yang berhak tidak menerima dan yang harusnya tidak masuk penerima malah menerima.** Hal ini dikarenakan data yang digunakan masih menggunakan data tahun 2015, padahal dari tahun 2016-2020 dipastikan ada perubahan. "Untuk itu, harus ada validasi data terbaru. Jangan sampai penyaluran BST tahun 2021 masih menggunakan data 2015, sehingga perlu update data terbaru," kata Zahid.

Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](#) dengan judul "Ada yang Tidak Tepat Sasaran, Bantuan Sosial Tunai di DIY Perlu Direvisi". Klik untuk baca: [Kompas.com - Ada yang Tidak Tepat Sasaran, Bantuan Sosial Tunai di DIY Perlu Direvisi](#)

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan lingkungan adalah jumlah dan jenis limbah yang terdapat di lingkungan. Jumlah limbah yang terdapat di lingkungan akan menunjukkan tingkat kesehatan lingkungan. Semakin banyak limbah yang terdapat di lingkungan, maka semakin buruk kesehatan lingkungan. Selain itu, jenis limbah yang terdapat di lingkungan juga dapat menunjukkan tingkat kesehatan lingkungan. Limbah yang berbahaya akan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memantau jumlah dan jenis limbah yang terdapat di lingkungan secara berkala.

Kabar Ombudsman



Pengantar Kelembagaan
Ombudsman RI sebagai Pengawas
Pelayanan



Konsultasi Masalah Agraria Kominfo
DPRD Peta Kemendagri Benua



Compu d i s t r i b u t i o n D e r e n g H e r m e r e
Laporan Instansi P P r a m u j a n d a D a j a



1. **Wiederholung** des Phänomens (z.B. 10 Mal)
 2. **Beobachtung** des Phänomens (z.B. 10 Mal)
 3. **Beobachtung** des Phänomens (z.B. 10 Mal)



Respons Cepat Ombudsman Waya Ontanggapi

Terima Kasih



Drs. Subhan, M.Si
**Dekan FISIP Universitas
Muhammadiyah Cirebon**

Tempat, Tanggal Lahir: Kuningan, 31 Oktober 1964

Riwayat Pendidikan:

S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Pajajaran Bandung Tahun 1991

S2 Administrasi Publik STIAM Jakarta Tahun 2006

Riwayat Pekerjaan :

1992-2003

**Dosen DPK Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Malang**

2003-sekarang

Dosen DPK Universitas Muhammadiyah Cirebon

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Subhan

PENDAHULUAN

- Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia
- Pemerintah mengeluarkan berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui program JPS
- Implementasi program program JPS, dilapangan ternyata masih terdapat persoalan yang ditemui terutama berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program
- Biasanya bermuara pada persoalan pemutakhiran data dan validitas data dari penerima manfaat program
- Pandemi covid-19 menjadi momentum untuk melakukan pemutakhiran data dan memperbaiki validitas data untuk program penanggulangan kemiskinan

Regulasi DTKS

Regulasi Program JPS atas dasar dukungan data, sebelumnya sudah ada yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu

DTKS Keberlanjutan

- Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015
- Tahun 2011 dan 2008 telah dilakukan pendataan serupa dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)
- Pendataan tersebut merupakan kelanjutan dari Pendataan Sosial Ekstrem (PSE) yang dilakukan pada tahun 2005

Prinsip Utama Pemerintahan FISIP
PROGRES, PRO BERSIH, PRO MANAJEMEN, PRO LAYANAN

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan DTKS



- Pengelolaan DTKS melibatkan baik dari instansi pusat pemerintah pada level provinsi juga pemerintah kabupaten/kota
- Perlu harmonisasi berpedoman pada aturan main
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah
 - Permensos Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Prinsip Utama Pemerintahan FISIP
PROGRES, PRO BERSIH, PRO MANAJEMEN, PRO LAYANAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



- Mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
- urusan pemerintah di bidang Sosial merupakan bersifat kongruen,
- urusan kongruen adalah urusan yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan kabupaten kota
- Urusan pemerintahan yang kongruen yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
- Urusan sosial dikategorikan sebagai urusan wajib yang termasuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP

DISKUSI DAN PEMBAHASAN KASUS

Peraturan Nomor 5 Tahun 2019



- Tahapan pengelolaan DTKS
- Kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan
- Tahapan Pengelolaan menyangkut
 - 1. Pendataan,
 - 2. Verifikasi dan Validasi,
 - 3. Penetapan , dan
 - 4. Penggunaan

Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP

DISKUSI DAN PEMBAHASAN KASUS

Regulasi DTKS

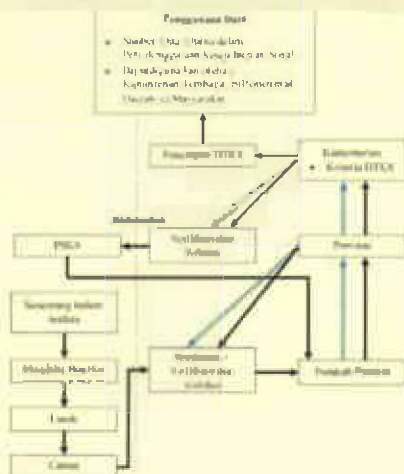
Regulasi Program JPS atas dasar dukungan data, sebutannya sudah ada yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu.

DTKS Keberlanjutan

1. Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan Penuturan Basis Data Terpadu (PBOT) 2015.
2. Tahun 2011 dan 2008 telah dilakukan pendataan serupa dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS).
3. Pendataan tersebut merupakan kolaborasi dari Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) yang dilakukan pada tahun 2010.

Profil Ilmu Pemerintahan FISIP
PROFESSOR DR. HENDRIKUS KURNIA SUDARMA

Tahapan dan Kewenangan Pengelolaan DTKS



Tabel Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan DTKS

Kewenangan	Tingkat Pemerintahan		
	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Penetapan Kriteria	✓		
Pendaftaran		✓	✓✓
Verifikasi dan Validasi	✓✓	✓✓	✓
Penetapan	✓		
Penggunaan	✓	✓	✓

Profil Ilmu Pemerintahan FISIP
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (JISH)

Rekomendasi

Dalam rangka memperkuat pengelola DTKS perlu melakukan revisi atau peninjauan kembali terhadap Permensos Nomor 5 tahun 2019 dalam :

- Pengelolaan DTKS perlu melibatkan pemerintah desa mulai dari awal pendataan, karena desa merupakan pemerintahan yang paling mengetahui tentang data yang akan menerima manfaat dari program
- Dalam pengelolaan DTKS pemberian peran lebih kepada PSKS sebagai tenaga teknis yang bisa memperkuat proses pendataan
- Di tingkat kabupaten/kota perlu membentuk "pusdatin" pengelolaan DTKS



Profil Ilmu Pemerintahan FISIP
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA (JISH)



Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP
UNIVERSITAS MUHARAMMADIAH SURABAYA

Terimakasih

👤 Subhan
✉ subhan@umc.ac.id





Sambutan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI



Sambutan Kepala Pusat Kajian AKN



Narasumber Seminar 26 April 2021



Narasumber FGD 27 April 2021



Foto Kegiatan

